

PROFIL GENDER KOTA SEMARANG
TAHUN 2024
Dengan ANGGARAN TAHUN 2025



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG**
Jl. Prof. Sudarto, Sumurboto, Kec. Banyumanik,
Kota Semarang
Jawa Tengah 50269

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, ***Profil Gender Kota Semarang Tahun 2024 dengan Tahun Anggaran 2025*** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai upaya untuk menyediakan data dan informasi yang komprehensif terkait kondisi kesetaraan gender di Kota Semarang. Profil ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, partisipasi politik, serta akses terhadap sumber daya dan layanan publik, yang dianalisis berdasarkan jenis kelamin.

Penyusunan profil gender ini bertujuan untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan yang responsif gender, sehingga pembangunan di Kota Semarang dapat berlangsung secara adil dan inklusif bagi seluruh warga, baik perempuan maupun laki-laki.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik melalui penyediaan data, analisis, maupun masukan dalam proses penyusunan dokumen ini. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga ***Profil Gender Kota Semarang Tahun 2024 dengan Tahun Anggaran 2025*** ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender di Kota Semarang.

Semarang, 8 Agustus 2025

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG



dr. Noegroho Edy Riyanto, M.Kes

Pembina Tk.1/IV -b

NIP. 197110202002121000

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GRAFIK	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	4
1.3. Metode Penelitian.....	5
1.4. Dasar Hukum.....	6
BAB II KAJIAN TEORI GENDER	9
2.1. Konsep Gender	9
2.2. Gender Mainstreaming	17
BAB III GAMBARAN KOTA SEMARANG	19
3.1. Visi dan Misi Kota Semarang	
3.2. Topografi	20
3.3. Demografi	23
BAB IV GENDER KOTA SEMARANG	26
4.1. Indikator Gender	26
4.2. Perempuan dan Pendidikan	33
4.3. Perempuan dan Kesehatan	39
4.4. Perempuan, Tenaga Kerja dan Ekonomi	42
4.5. Perempuan dan Koperasi	59
4.6. Perempuan dan Mekanisme Politik	65
4.7. Perempuan, Politik dan Hukum	76
4.8. Perempuan, Anak dan Kekerasan	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	96
5.1. Kesimpulan	96
5.2. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Perbedaan Perempuan dan Laki-laki	14
Tabel 3.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kota Semarang Tahun 2024	21
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024	23
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	24
Tabel 4.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Semarang	26
Tabel 4.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Semarang	27
Tabel 4.3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024	28
Tabel 4.4	Indeks Ketimpangan Gender Kota Semarang	29
Tabel 4.5	Pengeluaran Riil per Kapita Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024	30
Tabel 4.6	Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2024	31
Tabel 4.7	APM Siswa SD Sederajat di Kota Semarang Tahun Ajaran 2023/2024	33
Tabel 4.8	APM Siswa SMP Sederajat di Kota Semarang Tahun Ajaran 2023/2024	34
Tabel 4.9	Jumlah Siswa SMA Sederajat di Kota Semarang Tahun 2024/2025	35
Tabel 4.10	Tingkat Melek Huruf Berdasarkan Jenis Kelamin	36
Tabel 4.11	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) Tahun Ajaran 2024/2025	37
Tabel 4.12	Desa/Kelurahan Yang Memiliki Fasilitas Pendidikan Nonformal	38
Tabel 4.13	Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2024	40
Tabel 4.14	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu	41
Tabel 4.15	Pengguna KB berdasar Jenis Alat Kontrasepsi	41
Tabel 4.16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024	42

Tabel 4.17	Tenaga Kerja di Kota Semarang Tahun 2024	43
Tabel 4.18	Penduduk Usia Kerja di Kota Semarang Tahun 2024	45
Tabel 4.19	Tingkat Kesempatan Angkatan Kerja Tahun 2024	47
Tabel 4.20	Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2024	49
Tabel 4.21	Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2024	51
Tabel 4.22	Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2024	54
Tabel 4.23	Tingkat Partisipasi Bekerja per Jenjang Pendidikan	...56
Tabel 4.24	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas di Kota Semarang Tahun 2024	58
Tabel 4.25	Perempuan dan Koperasi Tahun 2024	60
Tabel 4.26	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kota Semarang Tahun 2024	66
Tabel 4.27	Jumlah Tenaga Kesehatan	70
Tabel 4.28	Jumlah Guru dan Kepala Sekolah di Kota Semarang Tahun Ajaran 2024/2025	73
Tabel 4.29	Perempuan di Bidang Politik dan Hukum Tahun 2024	77
Tabel 4.30	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	81
Tabel 4.31	Kasus Kekerasan pada Anak per Kecamatan Tahun 2024	83
Tabel 4.32	Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2024	85
Tabel 4.33	Kasus Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian Tahun 2024	86
Tabel 4.34	Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Layanan Yang Diberikan di Tahun 2024	87
Tabel 4.35	Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Tindak Kekerasan Yang Dialami Korban Tahun 2024	88

Tabel 4.36	Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2024	90
Tabel 4.37	Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2024	91
Tabel 4.38	Jumlah Korban Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024	92
Tabel 4.39	Jumlah Korban Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2024	93
Tabel 4.40	Jumlah Korban Berdasarkan Status Perkawinan Tahun 2024	94

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.	Piramida Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	25
Grafik 4.1.	Proporsi Gender Dalam Dunia Kerja Tahun 2024	49
Grafik 4.2.	Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2024	50
Grafik 4.3.	Distribusi Gender Menurut Status Pekerjaan	52
Grafik 4.4.	Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2024	56
Grafik 4.5.	Pertumbuhan Tenaga Kerja Disabilitas Kota Semarang	58
Grafik 4.6.	Jumlah Tenaga Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024	70
Grafik 4.7.	Jumlah Guru dan Kepala Sekolah di Kota Semarang Berdasarkan Gender	75
Grafik 4.8.	Kasus Kekerasan pada Anak per Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2024	84
Grafik 4.9.	Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2024	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Peta Kota Semarang	20
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang adil dan merata merupakan cita-cita utama dalam proses pembangunan nasional. Hal ini tidak hanya mencakup pemerataan akses terhadap sumber daya, pelayanan publik, dan kesempatan berusaha, tetapi juga menjamin bahwa setiap warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, memperoleh manfaat yang setara dari pembangunan tersebut. Dalam konteks ini, kesetaraan dan keadilan gender menjadi salah satu prinsip fundamental yang harus diintegrasikan dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program dan kebijakan.

Tetapi pada kenyataannya harkat, martabat dan akses perempuan di berbagai bidang pembangunan masih belum setara. Sesungguhnya berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai lembaga negara untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan, bahkan lembaga negara sejak awal secara eksplisit telah menjamin persamaan hak dan kedudukan setiap warga negara, laki-laki dan perempuan. Dalam konstitusi negara UUD 1945, misalnya, dikemukakan jaminan negara atas persamaan hak bagi setiap warga dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1), pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27, ayat 2), usaha bela negara (Pasal 30) dan dalam memperoleh pendidikan (Pasal 31).

Secara lebih operasional, GBHN 1999 mengamanatkan perlu adanya lembaga yang mampu mengemban kebijakan nasional untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi dunia dan menandatangani sejumlah deklarasi internasional berkaitan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Hal itu dijelaskan seperti berikut.

1. Konvensi ILO No. 100 tahun 1950 dengan UU No. 80/1957 tentang Pengupahan yang Sama bagi Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya;

2. Konvensi Hak Politik Perempuan (New York) dengan UU No 68/1958;
3. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dengan UU No 7/1984;
4. Konvensi ILO No. 111 tahun 1985 dengan UU No. 21/1999 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan;
5. Konferensi Dunia ke IV tentang Perempuan (Beijing tahun 1985);
6. Deklarasi Jakarta (ASPAC tahun 1994);
7. Konferensi Internasional tentang Pembangunan Sosial (Copenhagen tahun 1994);
8. Optional Protocol 28 Februari 2000.

Adanya jaminan konstitusi dan berbagai kebijakan formal tersebut ternyata tidak dengan sendirinya bisa mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan nyata. Dalam kenyataan, masih tampak berbagai bentuk ketimpangan gender pada berbagai aspek kehidupan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan ini adalah Gender Empowerment Measurement (GEM) dan Gender-related Development Index (GDI) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Human Development Index. Untuk Global Gender Gap Index 2024 versi World Economic Forum, Indonesia berada di peringkat 100 dari 146 negara, dengan skor mencerminkan keseimbangan sekitar 68,6%.

Kesenjangan gender masih tampak terjadi di berbagai bidang pembangunan, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, politik, dan di bidang pemerintahan. Untuk memperkecil kesenjangan gender yang terjadi pada berbagai sektor kehidupan, maka kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan saat ini dan di masa mendatang harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, pada seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional.

Guna menjamin penyelenggaraan pembangunan seperti ini, pemerintah menerbitkan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan yang mewajibkan seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non departemen di pusat dan di daerah untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program yang berada di bawah tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Kota Semarang sebagai salah satu bagian dari Indonesia tidak terlepas dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat kompleks. Laki-laki dan perempuan di Kota Semarang sama-sama memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota, baik dalam sektor publik maupun domestik. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan gender yang cukup signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, posisi kepemimpinan, serta partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Kesenjangan ini pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak.

Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan dan pentingnya integrasi perspektif gender dalam pembangunan menjadi semakin mendesak di tengah upaya pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Tujuan 5 dari SDGs secara khusus menekankan pentingnya mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Semarang dituntut untuk memiliki data dan informasi yang terpilah menurut jenis kelamin, yang dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan program yang lebih responsif gender.

Oleh karena itu, penyusunan Profil Gender Kota Semarang Tahun 2025 merupakan langkah strategis sebagai upaya mendokumentasikan kondisi faktual terkait kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor pembangunan. Profil ini akan menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural dan kultural yang menghambat perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan yang setara. Selain itu, profil gender ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai capaian serta tantangan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di Kota Semarang.

Disamping menjadi alat monitoring terhadap capaian upaya-upaya pengarusutamaan gender yang dilakukan pemerintah. Harus disadari bahwa capaian di berbagai aspek kesetaraan gender merupakan kerja keras kita semua sehingga layak untuk diberikan apresiasi. Sebagai kota dengan

penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya kategori Mentor pemetaan gender dapat menjadi salah satu upaya memetakan berbagai capaian yang ada di kota Semarang.

Lebih jauh, profil gender ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berperspektif gender, sehingga kebijakan dan program yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan nyata dari seluruh kelompok masyarakat. Pemerintah Kota Semarang menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, setara, dan berkeadilan dengan menjadikan isu gender sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan publik. Dengan demikian, penyusunan Profil Gender Kota Semarang Tahun 2025 bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai upaya nyata menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud:

Penyusunan Profil Gender Kota Semarang Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya untuk menyediakan data dan informasi yang komprehensif, akurat, dan terpilah berdasarkan jenis kelamin, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan yang responsif gender di Kota Semarang.

1.2.2. Tujuan:

- a) Menyediakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin di berbagai sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, dan partisipasi politik, sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang adil dan setara.
- b) Mengidentifikasi kesenjangan gender yang masih terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Kota Semarang.
- c) Mendorong perumusan kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan.

- d) Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan kelima yaitu kesetaraan gender, serta mendukung pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat daerah.
- e) Memberikan acuan bagi instansi pemerintah, akademisi, LSM, dan pihak terkait lainnya dalam mengembangkan program yang berkeadilan gender.

1.3. Metode Penelitian

1.3.1. Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Mixed Methods)

Penyusunan profil gender menggunakan gabungan metode kuantitatif (data statistik terpilah berdasarkan jenis kelamin) dan kualitatif (analisis naratif, wawancara, dan studi kasus) untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi gender di berbagai sektor.

1.3.2. Pengumpulan Data Terpilah

Mengumpulkan data sekunder dari instansi terkait (BPS, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial, dinas tenaga kerja, dll).

Data yang dikumpulkan harus terpilah berdasarkan jenis kelamin dan mencakup indikator-indikator gender seperti:

1. Tingkat pendidikan
2. Akses layanan kesehatan
3. Partisipasi kerja dan tingkat pengangguran
4. Representasi dalam jabatan publik/politik
5. Kasus kekerasan berbasis gender

1.3.3. Analisis Gender

Metode analisis yang digunakan antara lain:

- a) Analisis Akses dan Kontrol: untuk mengetahui siapa yang memiliki akses dan kontrol atas sumber daya (pendidikan, ekonomi, layanan publik).
- b) Dengan menggunakan Analisis Partisipasi: untuk melihat sejauh mana keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan.
- c) Analisis Beban Kerja: untuk mengukur beban kerja produktif dan reproduktif antara laki-laki dan perempuan.

- d) Analisis GAP (Gender Analysis Pathway): untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dalam kebijakan dan program.

1.3.4. Studi Literatur dan Dokumentasi

Melibatkan studi terhadap:

- a) Dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, Renstra, RAD PUG)
- b) Undang-undang dan kebijakan nasional terkait kesetaraan gender
- c) Dokumen laporan dan profil tahun-tahun sebelumnya sebagai pembandingan

1.3.5. Wawancara dan Diskusi Terfokus (jika memungkinkan)

Wawancara dengan pejabat OPD, tokoh masyarakat, dan aktivis gender. Diskusi kelompok terfokus (FGD – Focus Group Discussion) untuk menggali informasi kualitatif yang tidak terekam dalam data statistik.

1.3.6. Validasi dan Konsultasi Publik

- 1. Melakukan validasi data dengan instansi penyedia data.
- 2. Menyelenggarakan forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum finalisasi dokumen.

1.4. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - a) Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan...”
 - b) Pasal 28H dan 28I: Menjamin hak atas perlindungan, kesempatan yang sama, dan kesetaraan gender.
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Merupakan komitmen Indonesia untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bidang kehidupan.
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Menegaskan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan yang memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Pemerintah daerah berwenang menyusun data dan profil daerah, termasuk dalam perspektif gender.

4. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

Merupakan landasan utama Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh lembaga pemerintahan, termasuk daerah. Menginstruksikan agar semua instansi menyusun data terpilah dan profil gender sebagai bagian dari perencanaan pembangunan responsif gender.

5. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

Mewajibkan pemerintah daerah melakukan pengumpulan dan analisis data terpilah berdasarkan jenis kelamin serta menyusun profil gender daerah secara berkala.

6. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Mengatur strategi perencanaan dan penganggaran responsif gender berbasis data, termasuk penyusunan profil gender sebagai salah satu instrumen pendukung. RPJMN Indonesia periode 2020–2024, pengarusutamaan gender atau keadilan gender termasuk dalam Sasaran Prioritas Nasional kedua dari lima sasaran prioritas utama

7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026.), Sasaran 1.3.2: Meningkatnya Kesetaraan Gender dengan Indikator sasaran adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG).

8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender. Perda ini ditetapkan pada 17 November 2021 dan bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh aspek pembangunan daerah.

9. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender. Peraturan ini mulai berlaku pada 6 April 2023

dan menjadi pedoman teknis bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pengarusutamaan gender, termasuk dalam penyusunan Profil Gender Kota Semarang.

BAB II

KAJIAN TEORI GENDER

2.1. Konsep Gender

2.1.1. Jenis kelamin (seks) adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan

Gender adalah konstruksi sosial dan budaya yang menentukan peran, perilaku, tanggung jawab, dan hak yang dianggap sesuai untuk laki-laki dan perempuan. Kata “gender” berasal dari bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin”. *Women’s Studies Encyclopedia* menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Istilah “Gender” pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk membedakan ciri-ciri manusia berdasarkan pada pendefinisian yang berasal dari ciri fisik biologis. Stoller mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang diperkenalkan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia. Dalam ilmu sosial Ann Oakley juga berjasa dalam pengembangan istilah dan pengertian gender pada tahun 1972. Ann Oakley dalam bukunya “*Sex, Gender and Society*” mengatakan bahwa gender merupakan perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan.

Gender berbeda dengan seks. Gender umumnya digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek sosiokultural, sedangkan seks umumnya digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dalam anatomi biologis. Kata seks dalam kamus Bahasa Inggris Indonesia artinya jenis kelamin. Menurut Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA, Seks merupakan aspek biologis manusia yang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon di dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakter fisik biologis lainnya. Sedangkan menurut Mansour Faqih, seks berarti jenis kelamin yang merupakan pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis tidak dapat diubah dan bersifat menetap, kodrat dan tidak dapat ditukar. Studi tentang gender menekankan tentang perkembangan aspek maskulinitas atau feminitas seseorang. Sedangkan

studi tentang seks lebih menekankan perkembangan aspek biologis yang komposisinya kimia dalam tubuh laki-laki dan perempuan. Alat-alat secara biologis tidak dapat dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Jika didefinisikan secara seks laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, jakun (kala manjing), dan memproduksi sperma. Sedangkan secara seks perempuan adalah manusia yang memiliki reproduksi, seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina dan mempunyai alat menyusui¹.

2.1.2. Teori Konstruksionis Sosial (Social Construction Theory)

Menyatakan bahwa gender bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir, tetapi dibentuk oleh lingkungan sosial, budaya, dan sejarah. Tokoh penting: Judith Butler (dengan konsep *gender performativity*).

Konstruksi sosial adalah teori sosiologi kontemporer yang dikemukakan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckman teori ini merupakan kajian teoretis dan sistematis berkenaan dengan sosiologi pengetahuan. Peter L Berger atau Peter Ludwig Berger adalah sosiolog kelahiran Voenna, Austria. Tahun 1929 tanggal 17 Maret beliau lahir dari anak seorang pebisnis. Di Vienna Peter menghabiskan masa kecilnya dan akhirnya beliau bermigrasi ke Amerika Serikat setelah tak lama perang dunia kedua berakhir. Berger mendapatkan gelar Bachelor of Arts ketika mampu menyelesaikan studinya di Warger College. Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikannya di New School For Social Research yang bertempat di New York. Pendidikannya kini selesai pada tahun 1950 dan mendapatkan gelar Magister of Arts-nya. Selanjutnya Berger mendapat gelar Ph.D pada dua tahun kemudian. Teori ini berfokus pada hal-hal seperti tinjauan tokoh, pengaruh, maupun sejenisnya.

Realitas sosial adalah konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu, individu merupakan manusia yang bebas yang melakukan hubungan interaksi dengan individu lainnya menjadi faktor penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi melalui kehendaknya. Individu memiliki kemampuan untuk memproduksi maupun mereproduksi dunia sosialnya. Konstruksi sosial atas

¹ https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/32388/13/T1_272019017_Bab%20II.pdf. Senin, 19/05/2025

realitas sosial pertama kali diperkenalkan oleh Peter L Berger bersama Thomas Luckman melalui bukunya yang berjudul "The Social Construction Of Reality, a Treatise in The Sociological of Knowledge" (1966). Pada hal ini, Berger dan Luckman menjelaskan bahwa proses sosial berdasarkan tindakan dan interaksi. Berger mengemukakan bahwa manusia dan Masyarakat merupakan produk yang dialektis, dinamis dan plural, di mana individu terus-menerus menciptakan suatu realitas yang dimiliki maupun yang dialami bersama secara subjektif. Teori konstruksi mengandung pemahaman bahwa kenyataan (reality) dibangun secara sosial, serta kenyataan (reality) dan pengetahuan (knowledge) merupakan dua istilah kunci untuk memahaminya. Kenyataan adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang diakui memiliki keberadaan (being)-nya sendiri sehingga tidak tergantung kepada kehendak manusia sedangkan pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata (real) dan memiliki karakteristik yang spesifik.

Menurut Berger dan Luckman, masyarakat merupakan suatu kenyataan yang subjektif sekaligus suatu kenyataan yang objektif. Masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari dalam diri manusia, namun masyarakat juga terlihat berada di luar diri manusia. Sehingga manusia merupakan substansi yang mampu membentuk dan menentukan seperti apa rupa suatu masyarakat dan masyarakat dapat menjadi pembentuk kepribadian manusia. Berger mengakui eksistensi realitas sosial objektif yang dapat dilihat dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga sosial dalam melihat struktur yang objektif yaitu, melalui proses eksternalisasi manusia dalam struktur yang sudah ada. Eksternalisasi ini kemudian memperluas institusionalisasi aturan sosial sehingga struktur merupakan suatu proses yang kontinu bukan sebagai suatu penyelesaian yang sudah tuntas².

Salah satu penyebab lahirnya teori konstruksi sosial yang dicetuskan oleh Petter L. Berger dan Thomas luckman adalah pernyataan mengenai apa itu "kenyataan". Hal ini disebabkan akibat dari dominasi dua paradigma filsafat yang bersifat empiris dan rasionalisme. Dengan konsepsi sosiologi

² Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010. Hal 305.

pengetahuan, Petter L. Berger pada akhirnya mampu menjawab pertanyaan dengan rumusan “Kenyataan Objektif” dan “Kenyataan subjektif”³. Masyarakat sebagai realitas objektif menyiratkan pelebagaan di dalamnya. Proses pelebagaan diawali oleh eksternal yang dilakukan secara berulang sehingga mampu melihatkan pemahaman bersama yang kemudian menghasilkan sebuah pembiasaan (Habitualisasi). Pembiasaan yang telah berlangsung memunculkan suatu tradisi di masyarakat yang kemudian diwariskan ke generasi setelahnya melalui sebuah bahasa sehingga terdapat peranan di dalam kelembagaan, termasuk dalam pewarisan tradisi ataupun pengalaman.

Masyarakat sebagai realitas objektif mampu menyiratkan keterlibatan legitimasi. Legitimasi adalah objektifikasi makna tingkat kedua dan merupakan pengetahuan yang berdimensi kognitif dan normatif, karena tidak hanya menyangkut penjelasan tetapi juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Legitimasi berfungsi untuk membuat objektifikasi yang sudah melembaga menjadi masuk akal secara subjektif. Masyarakat sebagai realitas subjektif menjelaskan bahwa, realitas objektif ditafsirkan secara subjektif oleh individu. Dalam proses penafsiran tersebut, internalisasi muncul dalam diri individu. Internalisasi adalah proses yang dialami setiap individu untuk mengambil alih dunia yang sedang dihuni sesamanya. Internalisasi berlangsung seumur hidup, melibatkan sosialisasi baik yang bersifat primer maupun sekunder sehingga mampu menerima situasi yang disampaikan orang lain mengenai Dunia Institusional⁴.

2.1.3. Teori Peran Gender (Gender Role Theory)

Menjelaskan bahwa masyarakat menciptakan harapan tertentu terhadap perilaku laki-laki dan perempuan. Anak-anak belajar peran ini sejak dini melalui sosialisasi keluarga, sekolah, media, dan agama.

Menurut Bem (dalam Wathani 2009), gender merupakan karakteristik kepribadian, seseorang yang dipengaruhi oleh peran gender yang dimilikinya

³ Ferry Adhi Dharma. Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Petter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial. Jurnal Ilmu Komunikasi. 7(1). 2018. Hal 2.

⁴ https://etheses.iainkediri.ac.id/14216/3/20105035_bab2.pdf. Senin, 19/05/2025

dan dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi yaitu maskulin, feminin, androgini dan tak terbedakan. Konsep Gender dan peran gender merupakan dua konsep yang berbeda, gender merupakan istilah biologis, orang-orang dilihat sebagai pria atau wanita tergantung dari organ-organ dan gen-gen jenis kelamin mereka. Sebaliknya menurut Basow (1992) dalam Wathani (2009), peran gender merupakan istilah psikologis dan kultural, diartikan sebagai perasaan subjektif seseorang mengenai ke-pria-an (maleness) atau kewanitaan (femaleness). Brigham (1986) dalam Naully (2003) lebih menekankan terhadap konsep stereotipe di dalam membahas mengenai peran gender, dan menyebutkan bahwa peran gender merupakan karakteristik status, yang dapat digunakan untuk mendukung diskriminasi sama seperti yang digunakan untuk mendukung diskriminasi sama seperti yang digunakan terhadap status-status yang lain seperti ras, kepercayaan, dan usia.

Sementara peran gender sendiri sebagai sebuah karakteristik memiliki determinan lingkungan yang kuat dan berkaitan dengan dimensi maskulin versus feminine, Stewart & Lykes, dalam Saks dan Krupat, (1998). Ketika berbicara mengenai gender, beberapa konsep berikut ini turut terlibat di dalamnya :

1. Gender role (peran gender), merupakan definisi atau preskripsi yang berakar pada kultur terhadap tingkah laku pria atau wanita.
2. Gender identity (identitas gender), yaitu bagaimana seseorang mempersepsi dirinya sendiri dengan memperhatikan jenis kelamin dan peran gender.
3. Serta sex role ideology (ideologi peran-jenis kelamin), termasuk di antaranya stereotipe-stereotipe gender, sikap pemerintah dalam kaitan antara kedua jenis kelamin dan status-status relatifnya, Segall, Dasen, Berry, & Poortinga, dalam Wathani (2009).

2.2. Orientasi Peran Gender

Bem dalam Wathani (2009) menyatakan bahwa terdapat dua model orientasi peran gender di dalam menjelaskan mengenai maskulintas dan feminitas, dalam kaitannya dengan laki-laki dan perempuan, yaitu model tradisional dan model non tradisional, Naully (2003).

1. Model tradisional memandang feminitas dan maskulinitas sebagai suatu dikotomi. Model tradisional menyebutkan bahwa maskulinitas dan feminitas merupakan titiktitik yang berlawanan pada sebuah kontinum yang bipolar. Pengukuran yang ditujukan untuk melihat maskulinitas dan feminitas menyebabkan derajat yang tinggi dari maskulinitas yang menunjukkan derajat yang rendah dari feminitas; begitu juga sebaliknya, derajat yang tinggi dari feminitas menunjukkan derajat yang rendah dari maskulinitas (Naully, 2003). Menurut pandangan model tradisional ini, penyesuaian diri yang positif dihubungkan dengan kesesuaian antara tipe peran gender dengan gender seseorang. Seorang pria akan memiliki penyesuaian diri yang positif jika ia menunjukkan maskulinitas yang tinggi dan feminitas yang rendah. Dan sebaliknya, seorang wanita yang memiliki penyesuaian diri yang positif adalah wanita yang menunjukkan feminitas yang tinggi serta maskulinitas yang rendah (Naully, 2003). Model tradisional dengan pengukuran yang bersifat bipolar ini memiliki konsekuensi, yaitu dimana individu-individu yang memiliki ciri-ciri maskulinitas dan feminitas yang relatif seimbang tidak akan terukur, sehingga menimbulkan reaksi dengan dikembangkannya model yang bersifat non tradisional (Naully, 2003). Model ini dapat digambarkan secara sederhana melalui gambar di bawah ini yang menjelaskan konseptualisasi dari maskulinitas-feminitas sebagai sebuah dimensi atau kontinum tunggal yang memiliki ujung yang berlawanan.

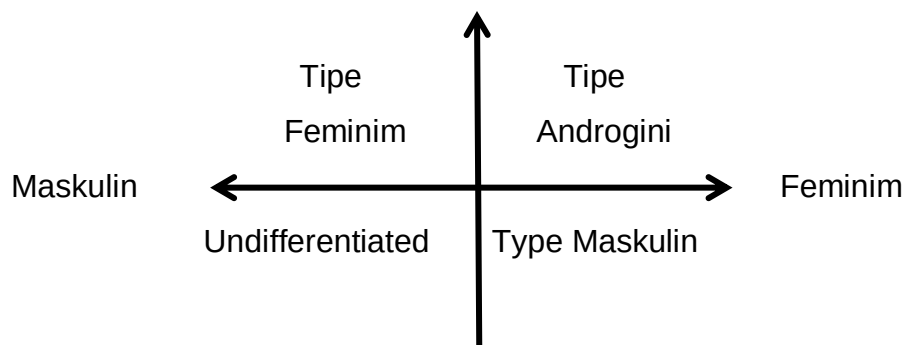


Gambar : Model Tradisional Peran Gender

Sumber : Wathani (2009)

2. Sedangkan pandangan nontradisional menyatakan bahwa maskulinitas dan feminitas lebih sesuai dikonseptualisasikan secara terpisah, dimana masing-masing merupakan dimensi yang independen. Model yang kedua ini memandang feminitas dan maskulinitas bukan merupakan sebuah dikotomi, hal ini menyebabkan kemungkinan untuk adanya pengelompokan yang lain, yaitu androgini, yaitu laki-laki atau perempuan yang dapat memiliki ciri-ciri maskulinitas sekaligus ciri-ciri feminitas. Model

non tradisional ini dikembangkan sekitar tahun 1970-an oleh sejumlah penulis, Bem (1974) dalam Wathani (2009) yang menyatakan bahwa maskulinitas dan feminitas lebih sesuai dikonseptualisasikan secara terpisah, karena masing-masing merupakan dimensi yang independen. Model ini dapat dijelaskan secara sederhana melalui gambar di bawah ini. Di sini dijelaskan bahwa konseptualisasi maskulinitas-feminitas digambarkan sebagai dimensi yang terpisah.



Gambar : Model Tradisional Peran Gender

Sumber : Wathani (2009)

Berdasarkan model nontradisional ini, terdapat semacam klasifikasi kepribadian yang mulai banyak dibicarakan sebagai alternatif dari peran yang bertolak belakang antara pria dan wanita, yaitu tipe androgini (Naully, 2003)

Tabel 2.1
Perbedaan Perempuan dan Laki-laki

Feminim	Maskulin		
		High	Low
	High	Androgini	Feminim
	Low	Maskulin	Undifferentiated

Sumber : Pearson, 1985 dalam Wathani (2009)

Adapun pengertian dari masing-masing peran gender maskulin, feminin dan androgini adalah sebagai berikut:⁵

1. Maskulin. Maskulin menurut Hoyenga & Hoyenga dalam Naully (2003) adalah ciri-ciri yang berkaitan dengan gender yang lebih umum terdapat

⁵ Sumber : <https://e-journal.uajy.ac.id/9746/3/2MM02272.pdf>

pada laki-laki, atau suatu peran atau trait maskulin yang dibentuk oleh budaya. Dengan demikian maskulin adalah sifat yang dipercaya dan dibentuk oleh budaya sebagai ciri-ciri yang ideal bagi laki-laki (Naully, 2003). Misalnya, asertif dan dominan dianggap sebagai trait maskulin.

2. Feminin. Feminin menurut Hoyenga & Hoyenga (dalam Naully, 2003) adalah ciri-ciri atau trait yang lebih sering atau umum terdapat pada perempuan daripada laki-laki. Ketika dikombinasikan dengan “stereotipikal”, maka ia mengacu ada trait diyakini lebih berkaitan pada perempuan daripada laki-laki secara kultural pada budaya atau subkultur tertentu. Berarti, feminin merupakan ciri-ciri atau trait yang dipercaya dan dibentuk oleh budaya sebagai ideal bagi perempuan, Naully (2003).
3. Androgini. Selain pemikiran tentang maskulinitas dan feminitas sebagai berada dalam suatu garis kontinum, dimana lebih pada satu dimensi berarti kurang pada dimensi yang lain, ada yang menyatakan bahwa individu-individu dapat menunjukkan sikap ekspresif dan instrumental. Pemikiran ini memicu perkembangan konsep androgini. Androgini adalah tingginya kehadiran karakteristik maskulin dan feminin yang diinginkan pada satu individu pada saat bersamaan, Bem; Spence & Helmrich, dalam Santrock, (2003) dalam Wathani (2009). Individu yang androgini adalah seorang laki-laki yang asertif (sifat maskulin) dan mengasihi (sifat feminin), atau seorang perempuan yang dominan (sifat maskulin) dan sensitif terhadap perasaan orang lain (sifat feminin). Beberapa penelitian menemukan bahwa androgini berhubungan dengan berbagai atribut yang sifatnya positif, seperti self-esteem yang tinggi, kecemasan rendah, kreatifitas, kemampuan parenting yang efektif (Bem, Spence & Helmrich, dalam Hughes & Noppe, 1985 dalam Wathani 2009).
4. Undifferentiated Merupakan keadaan laki-laki atau perempuan dengan skor maskulinitas dan feminitas rendah, sehingga tidak muncul kecenderungan maskulinitas maupun sisi femininnya. Basow (1992).

2.3. Gender Mainstreaming (Pengarusutamaan Gender / PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan

gender, dengan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Inpres No. 9 tahun 2000 menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.⁶

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 11 Tahun 2010 —yang mengatur Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Madrasah, Kementerian Agama RI—terdapat pasal yang menyebutkan tentang pengarusutamaan gender (PUG). Berdasarkan dokumen resmi Permen ini, Pasal 1 ayat (3) secara eksplisit memberikan definisi tentang Pengarusutamaan Gender, sebagaimana dikutip : “Pengarusutamaan Gender adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.”⁷

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengarusutamaan Gender adalah bentuk strategi yang digunakan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui program dan kebijakan yang dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi laki-laki dan perempuan dari mulai perencanaan sampai evaluasi kebijakannya.⁸

Pengarusutamaan gender ini sangat penting dilakukan karena memiliki beberapa tujuan. Pertama, pemerintah dapat bekerja lebih efisien dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender baik

⁶ Wewen Kusumi Rahayu, “Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik”, JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), 1(Juni, 2016), 99

⁷Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan, 2010

⁸ Idem

untuk rakyat lakilaki maupun perempuan. Kedua, kebijakan dan program perundang-undangan yang adil dan reponsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat. Ketiga, pengarusutamaan gender sebagai upaya menegakkan hak-hak dan kesempatan yang sama atas laki-laki dan perempuan. Keempat, pengarusutamaanngender akan mengantarkan pada pencapaian kesetaraan gender yang akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya. Kelima, Pengerusutamaan gender yang berhasil akan memperkuat kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh kebijakan dan program pembangunan. Bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender secara sistemik.

BAB III

GAMBARAN KOTA SEMARANG

3.1. Visi dan Misi Kota Semarang

Visi

“Kota Semarang menjadi pusat ekonomi yang maju, berkeadilan sosial, lestari dan inklusif”

Misi :

1. Mewujudkan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang toleran dan berbudaya dalam semangat kebhinekaan, serta meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian.
2. Mewujudkan kesehatan seluruh masyarakat yang berfokus pada kebutuhan individu dengan mengutamakan aspek pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi.
3. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar berupa ketersediaan pangan, sandang, dan papan yang merupakan elemen kunci agar tercapai taraf hidup yang layak.
4. Mewujudkan perekonomian inklusif melalui penyediaan lapangan kerja dengan membangun kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal, dan peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi digital.
5. Mewujudkan infrastruktur kota yang saling terhubung dengan peningkatan aksesibilitas, dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan.
6. Mewujudkan kualitas lingkungan kota yang tangguh, berkelanjutan, sekaligus peningkatan pengendalian banjir, rob, serta dampaknya bagi masyarakat.
7. Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban, dan inklusif berbasis kota cerdas.

3.2. Topografi

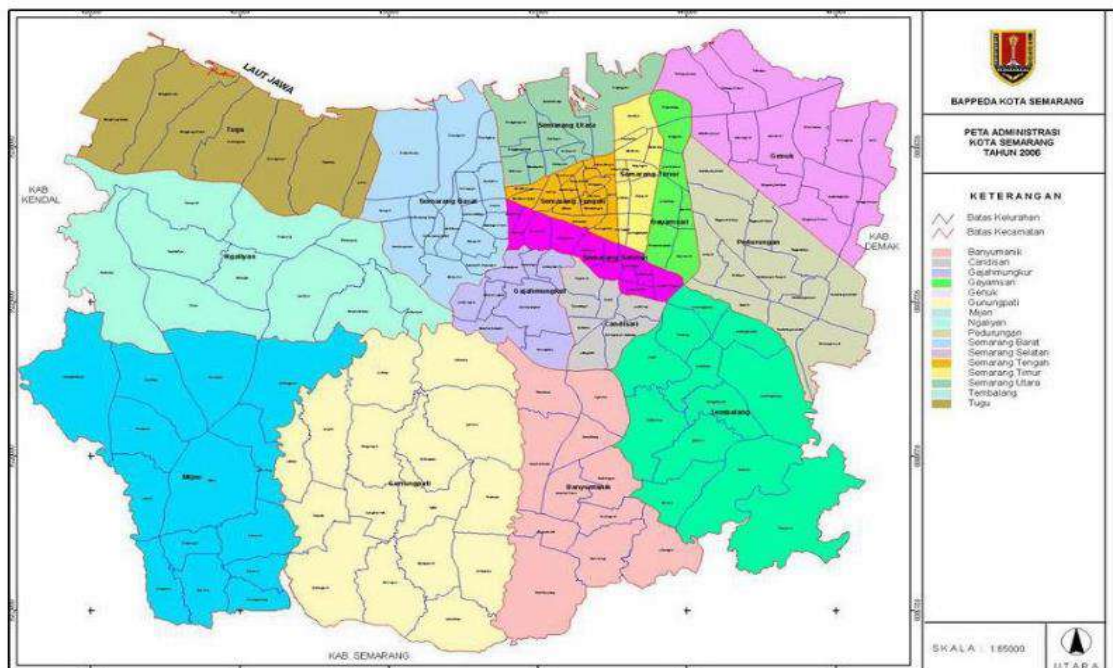
Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah, sekaligus kota metropolitan terbesar ke lima di Indonesia yang terletak sekitar 558 km sebelah timur Jakarta, atau 312 km sebelah barat Surabaya, atau 621 km sebelah barat daya Banjarmasin (via udara). Semarang berbatasan dengan Laut Jawa di bagian utara, Semarang di timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, di selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kota Kendal. Luas Kota 373.67 km².

Daerah dataran rendah di Kota Semarang sangat sempit, yakni sekitar 4 kilometer dari garis pantai. Dataran rendah ini dikenal dengan sebutan *kota bawah*. Kawasan kota bawah seringkali dilanda banjir, dan di sejumlah kawasan, banjir ini disebabkan luapan air laut (rob). Di sebelah selatan merupakan dataran tinggi, yang dikenal dengan sebutan *kota atas*, di antaranya meliputi Kecamatan Mijen, Gunungpati, Tembalang dan Banyumanik.

Pusat pertumbuhan di Semarang sebagai pusat aktivitas dan aglomerasi penduduk muncul menjadi kota kecil baru, seperti di Semarang bagian atas tumbuhnya daerah Banyumanik sebagai pusat aktivitas dan aglomerasi penduduk Kota Semarang bagian atas menjadikan daerah ini cukup padat. Fasilitas umum dan sosial yang mendukung aktivitas penduduk dalam bekerja maupun sebagai tempat tinggal juga telah terpenuhi. Banyumanik menjadi pusat pertumbuhan baru di Semarang bagian atas, dikarenakan munculnya aglomerasi perumahan di daerah ini. Dahulunya Banyumanik hanya merupakan daerah sepi tempat tinggal penduduk Semarang yang bekerja di Semarang bawah (hanya sebagai dormitory town). Namun saat ini daerah ini menjadi pusat aktivitas dan pertumbuhan baru di Kota Semarang, dengan dukungan infrastruktur jalan dan aksesibilitas yang terjangkau. Fasilitas perdagangan dan perumahan baru banyak bermunculan di daerah ini, seperti berdirinya beberapa mall, apartement dan lainnya, adanya perkembangan di daerah perbatasan dengan kota lain seperti di Kecamatan Mijen, dan fasilitas pendidikan baik negeri maupun swasta, seperti Unnes, Undip, Polines, Unika, dll, dengan dukungan akses jalan tol dan terminal moda yang memperlancar transportasi. Cepatnya pertumbuhan di daerah ini dikarenakan kondisi lahan di Semarang bawah sering terkena

bencana rob banjir. Akan tetapi terkait dengan permasalahan banjir di Kota Semarang yang selama ini kerap melanda kawasan rawan genangan kini berangsur tertangani berkat pemasangan pompa air di beberapa titik strategis. Pompa-pompa tersebut mampu mempercepat aliran air keluar dari wilayah tergenang, sehingga genangan tidak bertahan lama dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Dengan adanya infrastruktur ini, dampak negatif banjir terhadap akses transportasi, aktivitas ekonomi, maupun kenyamanan warga dapat dikurangi secara signifikan, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani persoalan banjir secara berkelanjutan.

Gambar 3.1
Peta Kota Semarang



Sumber : RPJMD Kota Semarang

Sedangkan luas wilayah sesuai dengan pembagian per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Semarang
Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	LUAS (km ²)	PERSEN (%)	KEPADATAN PENDUDUK
1	Mijen	14	56.52	15.12	1.646,90
2	Gunungpati	16	58.27	15.59	1.743,16
3	Banyumanik	11	29.74	7.96	4.833,05
4	Gajah Mungkur	8	9.34	2,50	6.029,02
5	Semarang Selatan	10	5.95	1,59	10.429,66
6	Candisari	7	6.40	1,71	11.793,19
7	Tembalang	12	39.47	10,56	5.113,34
8	Pedurungan	12	21.11	5,65	9.354,39
9	Genuk	13	25.98	6,95	5.287,18
10	Gayamsari	7	6.22	1,66	11.316,56
11	Semarang Timur	10	5.42	1,45	12.260,54
12	Semarang Utara	9	11.39	3,05	10.345,67
13	Semarang Tengah	15	5.17	1,38	10.671,14
14	Semarang Barat	16	21.68	5,80	6.888,85
15	Tugu	7	28.13	7,52	1.212,15
16	Ngaliyan	10	42.99	11,50	3.410,93
	Kota Semarang	177	373,78	100.00	4.571,76

Sumber : <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/153/239/1/luas-wilayah.html>, 2025

Dari data diatas, kecamatan terluas di Kota Semarang ada di Gunungpati (58,27 km² / 15,59% dari total luas kota). Sedangkan kecamatan terkecil adalah Gajah Mungkur (9,34 km² / 2,50%).Kecamatan dengan luas terbesar biasanya memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah.

Merujuk kepadatan penduduk Kecamatan terpadat: Semarang Timur: 12.260,54 jiwa/km²; Gayamsari: 11.316,56 jiwa/km²; Semarang Tengah: 10.671,14 jiwa/km². Kecamatan paling tidak padat : Mijen: 1.646,90 jiwa/km²; Gunungpati: 1.743,16 jiwa/km².

Dari sudut pandang perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah, dari data di atas dapat ditarik gambaran bahwa wilayah yang paling luas (seperti Mijen dan Gunungpati) justru berpenduduk lebih sedikit dibandingkan wilayah kecil seperti Semarang Timur dan Gayamsari. Begitu

juga dengan kepadatan penduduk yang cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk.

Jumlah kelurahan terbanyak adalah Semarang Barat dan Gunungpati (masing-masing 16), sedangkan jumlah kelurahan tersedikit ada di Gajah Mungkur (8). Tetapi hal ini tidak selalu berlaku bahwa semakin banyak kelurahan, semakin luas wilayahnya dan semakin lega kepadatan penduduknya. Seperti kondisi Gajah Mungkur, hanya punya 8 kelurahan dan wilayah kecil (9,34 km²), tapi kepadatan cukup tinggi (6.029,02 jiwa/km²).

Secara keseluruhan, Kota Semarang memiliki luas: 373,78 km² dengan rata-rata kepadatan penduduk: 4.571,76 jiwa/km². Beberapa kecamatan memiliki kepadatan lebih dari dua kali lipat rata-rata kota, seperti Semarang Timur dan Gayamsari. Dapat disimpulkan bahwa : Kecamatan padat dan kecil (Semarang Timur, Gayamsari, Semarang Tengah) adalah pusat perkotaan yang ramai, sedangkan Kecamatan luas dan jarang penduduk (Mijen, Gunungpati) berpotensi untuk pengembangan permukiman baru atau kawasan hijau. Penyebaran penduduk tidak merata, menunjukkan adanya konsentrasi di daerah pusat dan penurunan ke daerah pinggiran.

3.3. Demografi

1. Data Kependudukan

Data kependudukan merupakan kumpulan informasi yang memuat identitas dan karakteristik dasar setiap penduduk, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, status perkawinan, pekerjaan, hingga kewarganegaraan. Data ini dihimpun secara sistematis melalui sistem administrasi kependudukan dan sensus yang diselenggarakan pemerintah untuk keperluan perencanaan pembangunan, pelayanan publik, serta penentuan kebijakan yang tepat sasaran. Keakuratan dan kelengkapan data kependudukan menjadi hal penting karena berpengaruh pada berbagai aspek, mulai dari penyaluran bantuan sosial, penyediaan fasilitas umum, hingga pengendalian jumlah dan distribusi penduduk di suatu wilayah.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2024

NO	WILAYAH	L	P	JML	Rasio (%)
1	Semarang Tengah	27.467	29.651	57.118	92.63
2	Semarang Utara	58.435	59.865	118.300	97.61
3	Semarang Timur	33.558	35.343	68.901	95.84
4	Gayamsari	35.616	36.191	71.807	96.49
5	Genuk	64.650	64.269	128.919	97.86
6	Pedurungan	98.724	100.700	199.424	97.06
7	Semarang Selatan	32.476	33.833	66.309	95.99
8	Candisari	37.933	38.996	76.929	97.27
9	Gajahmungkur	28.490	29.518	58.008	96.52
10	Tembalang	96.945	97.486	194.431	99.44
11	Banyumanik	71.721	73.649	145.370	97.38
12	Gunungpati	51.360	51.523	102.883	98.54
13	Semarang Barat	74.940	77.394	152.334	96.83
14	Mijen	41.664	41.748	83.412	99.80
15	Ngaliyan	71.796	72.546	144.342	99.21
16	Tugu	16.962	16.930	33.892	100.19
	Kota Semarang	842.737	859.642	1.702.379	98.03

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang, 2025

Rasio penduduk sering dipakai untuk mendukung analisis pengarusutamaan gender (PUG), untuk memastikan kebijakan pembangunan mempertimbangkan kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan. Rasio dihitung dengan rumus $(L/P) \times 100$. Jika hasilnya 100, berarti jumlah laki-laki sama dengan jumlah perempuan. Jika nilainya di bawah 100 maka perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Begitu sebaliknya, jika di atas 100 maka laki-laki lebih banyak dari perempuan.

Jumlah penduduk laki-laki 842.737 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 859.642 jiwa. Jadi rasio jenis kelamin Kota Semarang adalah 98,03% atau sekitar 98% artinya, terdapat sekitar 98 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Berikut gambaran jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kota Semarang.

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Tahun 2024

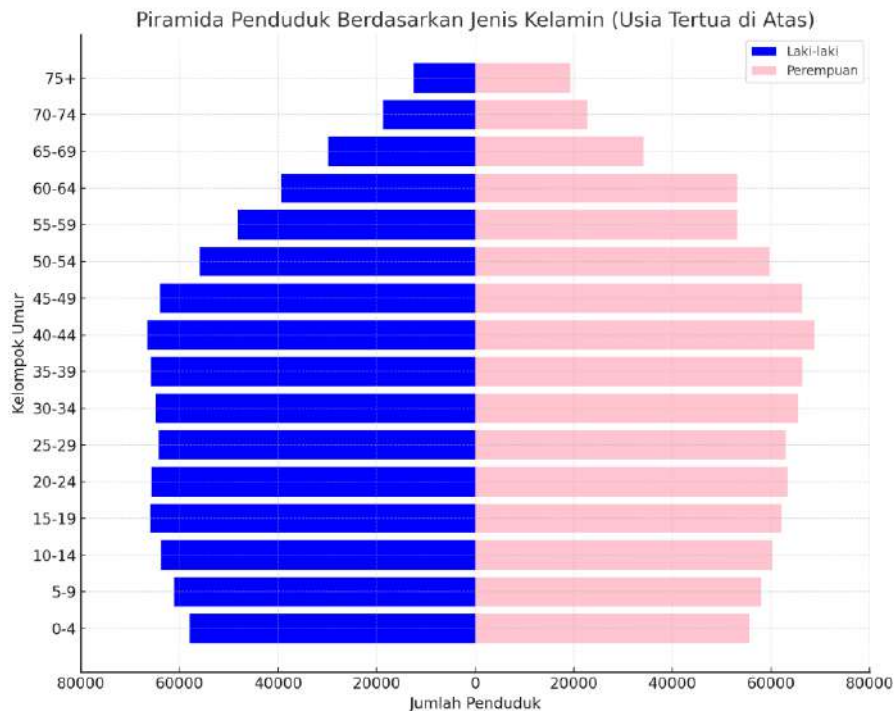
Umur (tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	57.967	55.667	113.634
5-9	61.120	58.045	119.165
10-14	63.672	60.287	123.959
15-19	65.890	62.132	128.027
20-24	66.726	63.426	130.152
25-29	64.245	62.935	127.180
30-34	64.864	65.434	130.298
35-39	65.815	66.913	132.728
40-44	66.510	68.823	135.333
45-49	64.015	66.896	134.793
50-54	55.857	59.760	130.911
55-59	48.110	53.216	101.326
60-64	39.315	53.216	92.531
65-69	29.897	34.122	64.019
70-74	18.681	22.742	41.423
75+	12.493	19.248	31.741
Total	845.177	863.656	1.708.833

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang, 2025

Berdasarkan tabel di atas kondisi demografi Kota Semarang terlihat sebagai berikut : Usia Belum Produktif (0–14 tahun) sebanyak 356,758 jiwa (20,87%); Usia Produktif (15–64 tahun) sebanyak 1,168,841 jiwa (68,43%); Usia Tidak Produktif (65 tahun ke atas) sebanyak 137,183 (8,03%); dan Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) sebesar 42,26.

Angka Ketergantungan yang menunjukkan besaran 42,26 artinya, setiap 100 penduduk Kota Semarang usia produktif harus menanggung sekitar 42 orang dari kelompok usia belum dan tidak produktif.

Grafik 3.1
Piramida Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik ini menunjukkan distribusi jumlah penduduk laki-laki (kiri, warna biru gelap) dan perempuan (kanan, warna pink muda) menurut kelompok umur. Tampak dari hasil grafik bahwa bagian terbawah (0–14 tahun) cukup lebar, menandakan populasi muda yang masih besar; bagian tengah (15–64 tahun) adalah mayoritas, mencerminkan dominasi usia produktif; bagian atas (65+ tahun) mulai menyempit, menunjukkan jumlah lansia yang lebih kecil.

Bila diambil konsep Indonesia emas, maka Indonesia khususnya Kota Semarang sudah mulai memasuki era bonus demografi. Piramida penduduk Indonesia menunjukkan struktur yang ideal untuk pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Tapi, potensi itu harus diikuti kebijakan yang tepat agar bonus demografi berubah menjadi dividen demografi, bukan sekadar angka.

BAB IV

GENDER KOTA SEMARANG

4.1. Indikator Gender

4.1.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran yang digunakan untuk melihat kesetaraan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPG menunjukkan sejauh mana perempuan memperoleh manfaat yang setara dengan laki-laki dalam hal angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita. Semakin tinggi nilai IPG, semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di suatu daerah, sehingga IPG sering dijadikan indikator penting dalam merumuskan kebijakan yang berperspektif gender dan mendorong terciptanya pembangunan yang lebih inklusif. Berikut diperlihatkan capaian IPG di Kota Semarang.

Tabel 4.1
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Semarang

KOTA	2023	2024
SEMARANG	95,91	96,28

Sumber : BPS Kota Semarang, 2025

Data diatas dapat diinterpretasikan bahwa terjadi kenaikan IPG dari 95,91 (2023) menjadi 96,28 (2024). Ini menunjukkan peningkatan kesetaraan gender, terutama dalam tiga dimensi utama IPG yaitu :

1. Kesehatan (Umur Harapan Hidup)
2. Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah)
3. Ekonomi (Pendapatan)

Dalam skala nasional, Angka IPG mendekati 100 menunjukkan bahwa pembangunan manusia perempuan hampir setara dengan laki-laki. IPG Kota Semarang tahun 2024 berada di angka 96,28 artinya pencapaian IPG Kota Semarang tinggi menurut standar nasional. Peningkatan ini bisa menjadi bukti

keberhasilan program-program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan akses. Namun, masih perlu perbaikan sebesar 3,72 untuk mencapai nilai 100.

4.1.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur sejauh mana perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam hal partisipasi politik, pengambilan keputusan, serta keterlibatan dalam kegiatan ekonomi. IDG biasanya mencakup indikator seperti persentase perempuan di parlemen, proporsi perempuan sebagai tenaga profesional atau manajerial, dan kontribusi perempuan terhadap pendapatan. Nilai IDG yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang lebih besar dalam proses pembangunan, baik dalam ranah publik maupun ekonomi, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi efektivitas kebijakan kesetaraan gender di suatu wilayah. Berikut diperlihatkan capaian IDG di Kota Semarang.

Tabel 4.2

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Semarang

KOTA	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
	2022	2023	2024
SEMARANG	73,93	73,86	78,71

Sumber : BPS Kota Semarang, 2025

Angka diatas menunjukkan data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Semarang dari tahun 2022 hingga 2024, yang mana jumlah tahun 2022 sebesar 73,93; tahun 2023 sebesar 73,86 dan tahun 2024 menunjukkan 78,71.

Terjadi penurunan capaian IDG dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 0,07 poin (dari 73,93 ke 73,86). Hal ini menunjukkan tantangan yang lebih besar di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. dan bisa dimungkinkan beberapa program pemberdayaan gender berjalan di tahun 2023 belum mencapai target sasaran.

Sedangkan di tahun 2023 ke 2024: Terjadi lonjakan signifikan sebesar 4,85 poin (dari 73,86 ke 78,71). Kenaikan ini menunjukkan perbaikan atau kemajuan dalam hal pemberdayaan gender, seperti: meningkatnya partisipasi perempuan di sektor ekonomi dan politik; dan perbaikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi perempuan.

Tren Umum :

1. Meskipun sempat menurun sedikit di 2023, secara keseluruhan IDG mengalami peningkatan yang positif dari 2022 ke 2024.
2. Peningkatan tajam di 2024 menunjukkan adanya program atau kebijakan yang berhasil mendorong pemberdayaan gender secara efektif.

4.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya melalui tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat (diukur dari angka harapan hidup), pengetahuan (diukur dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (diukur dari pengeluaran per kapita).

Nilai IPM memberikan gambaran tentang sejauh mana penduduk dapat menikmati akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Semakin tinggi IPM, semakin baik kualitas pembangunan manusia di wilayah tersebut, sehingga indikator ini menjadi acuan penting dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.

Tabel 4.3

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2024**

KOTA	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
	Laki-laki	Perempuan
SEMARANG	87,03	83,87

Sumber : BPS Kota Semarang, 2025

Perbedaan IPM antara laki-laki dan perempuan : IPM laki-laki: 87,03 dan IPM perempuan: 83,87, sehingga terdapat selisih point sebesar 3,16 poin. Ini menunjukkan bahwa IPM laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan di Kota Semarang. Adanya perbedaan IPM ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam akses atau hasil pembangunan antar gender, meskipun secara umum keduanya tergolong tinggi, karena IPM di atas 80 sudah termasuk kategori "tinggi" menurut standar BPS.

Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab selisih tersebut, seperti :

1. Pendidikan: Bisa jadi perempuan memiliki rerata lama sekolah atau harapan lama sekolah yang lebih rendah.
2. Kesehatan: Akses terhadap fasilitas kesehatan atau angka harapan hidup bisa berbeda.
3. Pendapatan: Perempuan mungkin memiliki tingkat partisipasi kerja atau penghasilan lebih rendah.

Walau selisih angka kesenjangan gender tahun 2023 ke tahun 2024 dikatakan tidak besar (3,16) tetapi tetap menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan setara gender.

4.1.4. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Fungsi dari IKG adalah mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: Kesehatan reproduksi; Pemberdayaan (pendidikan dan keterwakilan politik); dan Partisipasi ekonomi. Semakin rendah nilai IKG, semakin kecil ketimpangan gender.

Tabel 4.4

Indeks Ketimpangan Gender Kota Semarang

KOTA	2023	2024
SEMARANG	0,168	0,140

Sumber : BPS Kota Semarang, 2025

IKG Kota Semarang menurun dari 0,168 (2023) menjadi 0,140 (2024). Penurunan sebesar 0,028 poin ini menunjukkan perbaikan dalam kesetaraan gender. Nilai 0,140 di tahun 2024 ini termasuk relatif rendah, menandakan bahwa kesenjangan gender di Kota Semarang sudah cukup kecil, namun belum sepenuhnya setara. Bila dikaitkan dengan data IPM sebelumnya (IPM laki-laki: 87,03 dan perempuan: 83,87), terlihat bahwa meskipun masih ada gap IPM, ketimpangan gender secara umum berkurang.

Upaya pembangunan inklusif dan sensitif gender di Kota Semarang mulai menunjukkan hasil yang positif. Namun, masih diperlukan intervensi lebih lanjut untuk menghapus sisa ketimpangan, terutama dalam dimensi ekonomi dan pendidikan, sebagaimana tercermin dari perbedaan IPM menurut jenis kelamin.

4.1.5. Riil per Kapita

Pengeluaran riil per kapita adalah rata-rata jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh setiap individu dalam suatu rumah tangga dalam periode tertentu, setelah disesuaikan dengan faktor inflasi sehingga mencerminkan daya beli sebenarnya. Indikator ini sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat karena menunjukkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar maupun non-dasar. Semakin tinggi pengeluaran riil per kapita, umumnya semakin baik pula tingkat konsumsi dan akses masyarakat terhadap barang serta jasa, sehingga data ini menjadi salah satu acuan penting dalam perumusan kebijakan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Tabel dibawah menunjukkan gambaran mengenai perbandingan pengeluaran laki-laki dengan perempuan di Kota Semarang.

Tabel 4.5
Pengeluaran Riil per Kapita Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2024

KOTA	Pengeluaran Riil per Kapita (Ribu Rupiah)	
	Laki-laki	Perempuan
SEMARANG	18.175	15.750

Sumber : BPS Kota Semarang, 2025

Di wilayah Kota Semarang, Laki-laki memiliki pengeluaran sebesar Rp 18,18 juta/tahun sedangkan Perempuan sebesar Rp 15,75 juta/tahun. Keadaan ini memperlihatkan adanya selisih pengeluaran per kapita laki-laki dengan perempuan sebesar Rp 2.425.000, artinya bahwa laki-laki mengeluarkan lebih banyak secara riil dibandingkan perempuan per kapita.

Tingginya pengeluaran laki-laki bisa mencerminkan: penghasilan yang lebih tinggi: peran ekonomi yang lebih dominan; dan akses yang lebih luas terhadap sumber daya ekonomi.

Sedangkan lebih rendahnya pengeluaran perempuan bisa jadi karena: Tingkat partisipasi kerja yang lebih rendah; Perbedaan penghasilan atau pekerjaan informal.; dan beban domestik yang tidak menghasilkan pendapatan langsung.

Perbedaan ini sejalan dengan data IPM 2024, di mana laki-laki juga memiliki IPM lebih tinggi (87,03) dibanding perempuan (83,87). Meskipun IKG 2024 menunjukkan penurunan (0,140), perbedaan pengeluaran ini mengindikasikan masih adanya ketimpangan ekonomi antar gender. Data ini menguatkan pentingnya pengarusutamaan gender dalam kebijakan ekonomi, terutama untuk meningkatkan akses dan partisipasi ekonomi perempuan.

4.1.6. Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Jenis Kelamin

Angka Harapan Hidup (AHH) menurut jenis kelamin adalah indikator demografi yang menunjukkan perkiraan rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir, dengan mempertimbangkan pola kematian yang berlaku pada suatu periode tertentu, serta dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Biasanya, AHH perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan laki-laki karena faktor biologis dan perilaku, seperti perbedaan dalam gaya hidup, risiko pekerjaan, dan kebiasaan kesehatan. Data AHH menurut jenis kelamin penting untuk menganalisis kesenjangan kesehatan, merancang program pelayanan kesehatan yang lebih tepat sasaran, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan di bidang kesehatan dan kesejahteraan penduduk.

Tabel 4.6
Angka Harapan Hidup (AHH)
Tahun 2024

KOTA	Angka Harapan Hidup (AHH)			
	Laki-laki		Perempuan	
SEMARANG	2023	2024	2023	2024
	76,04	76,37	79,83	80,22

Sumber : BPS Kota Semarang, 2025

Merujuk pada data diatas, terjadi kenaikan AHH di Kota Semarang dari tahun 2023 menuju 2024. Laki-laki : naik dari 76,04 → 76,37 tahun (+0,33 tahun). Perempuan : naik dari 79,83 → 80,22 tahun (+0,39 tahun). Ini menunjukkan perbaikan kondisi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

Perbedaan AHH antar gender di tahun 2024 memperlihatkan perempuan hidup lebih lama rata-rata 3,85 tahun dibanding laki-laki (80,22 vs 76,37). Ini

adalah fenomena umum secara global, di mana perempuan cenderung memiliki angka harapan hidup lebih tinggi karena : faktor biologis (misalnya hormon estrogen); pola hidup dan risiko pekerjaan; dan tingkat kematian akibat penyakit atau kecelakaan yang lebih tinggi pada laki-laki.

Angka Harapan Hidup di Kota Semarang meningkat pada 2024 untuk kedua gender, mencerminkan peningkatan kualitas kesehatan dan hidup. Namun, perempuan masih memiliki harapan hidup lebih tinggi secara konsisten (+3,85 tahun di 2024).

Ketimpangan AHH ini bersifat alami dan positif, tapi belum mampu mengatasi ketimpangan IPM secara keseluruhan, terutama dalam aspek ekonomi dan pendidikan.

Jika dikaitkan dengan pengukuran IPM dan IKG, maka AHH merupakan salah satu komponen utama IPM (selain pendidikan & pengeluaran riil). Meskipun AHH perempuan lebih tinggi, IPM perempuan tetap lebih rendah daripada laki-laki di Kota Semarang. Ini mengindikasikan bahwa komponen pendidikan atau pengeluaran masih tertinggal bagi perempuan. Gap AHH yang besar ini tidak sepenuhnya mengimbangi ketimpangan ekonomi dan pendidikan, sehingga IKG tetap menunjukkan ketimpangan gender, walau menurun (0,140 pada 2024).

4.2. Perempuan dan Pendidikan

4.2.1. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang menunjukkan persentase jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya, dibandingkan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut secara keseluruhan. APM digunakan untuk mengukur ketercapaian pemerataan akses pendidikan formal, serta seberapa banyak anak yang mengikuti pendidikan tepat pada waktunya tanpa mengalami keterlambatan atau percepatan jenjang. Nilai APM yang tinggi mencerminkan bahwa sebagian besar anak berada di jenjang pendidikan yang sesuai, sementara nilai yang rendah menunjukkan adanya permasalahan seperti

putus sekolah, keterlambatan masuk sekolah, atau kesenjangan akses pendidikan. APM tingkat SD di Kota Semarang tahun ajaran 2023/2024.

Tabel 4.7

APM Siswa SD Sederajat di Kota Semarang

Tahun Ajaran 2023/2024

Siswa			Prosentase (%)	
L	P	JML	Usia 7-12th	APM
74.959	70.916	145.875	141.003	91,30

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2024

Melihat komposisi jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang menyandang status siswa SD sederajat, terlihat siswa laki-laki sejumlah 74.959 siswa dan siswa perempuan sebanyak 70.916 siswa, sehingga total siswa SD sebanyak 145.875 siswa.

Sedangkan siswa yang tepat masuk di usia 7-12 tahun ada sebanyak 141.003 siswa. Dalam penghitungan capaian APM (Angka Partisipasi Murni) Kota Semarang sebesar 91,30%. Artinya, hanya 91,3% dari anak usia 7–12 tahun yang bersekolah tepat di jenjang SD. Sisanya (sekitar 8,7%) kemungkinan berada di luar jenjang (misalnya belum masuk SD atau sudah naik ke jenjang SMP).

Dari siswa yang tepat usia 7-12 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun, ada 74.959 jiwa laki-laki dan 70.916 jiwa perempuan, Terdapat jumlah siswa SD yang usia tepat 7-12 tahun ada 141.003 dengan komposisi 74.959 siswa laki-laki dan 66.044 siswa perempuan. Artinya ada sekitar 6,86% anak perempuan usia 7–12 tahun yang belum terdaftar di SD sederajat. Ini menunjukkan adanya sedikit kesenjangan partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan usia SD di Kota Semarang tahun ajaran 2023/2024.

Berikut data APM tingkat SMP di Kota Semarang tahun ajaran 2023/2024.

Tabel 4.8
APM Siswa SMP Sederajat di Kota Semarang
Tahun Ajaran 2023/2024

Siswa			Siswa Usia 13-15th	Persentase
L	P	Jml		APM
38.132	36.010	74.142	67.766	85,18

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, tahun 2024

Data di atas tampak bahwa terdapat siswa SMP: 74.142 siswa, sedangkan siswa usia 13–15 tahun yang sekolah: 67.766 siswa, dan capaian APM (Angka Partisipasi Murni) sebesar 85,18%. Artinya, 85,18% anak usia 13–15 tahun bersekolah di jenjang yang sesuai (SMP). Sisanya (~14,82%) mungkin:

- a) Belum/tidak sekolah
- b) Berada di jenjang tidak sesuai usia (misalnya masih di SD)

Jika hanya dihitung berdasarkan siswa usia 13–15, maka APM turun menjadi 85,18%, artinya 14,82% anak usia 13–15 belum bersekolah di jenjang SMP.

- a) APM Laki-laki $\approx$ 109,32% dan
- b) APM Perempuan $\approx$ 109,51%

APM perempuan sedikit lebih tinggi, meskipun selisihnya sangat kecil, menunjukkan partisipasi pendidikan setara antar gender.

Data di bawah menunjukkan jumlah siswa usia 16-18 tahun di Kota Semarang tahun 2024.

Tabel 4.9
Jumlah Siswa SMA Sederajat di Kota Semarang
Tahun 2024/2025

No	Pendidik Usia 16- 18th BPS	Siswa	Siswa Usia 16-18th
		67.608	59.098

Sumber : Data Siswa SMA/SMK Negeri/Swasta Disdik
 Propinsi Jateng (Non Kemenag)

Data yang tampak menunjukkan jumlah siswa: 67.608 anak sedangkan jumlah siswa usia 16–18 tahun: 59.098 anak, yang artinya Terdapat 67.608 siswa yang sedang menempuh pendidikan, namun hanya 59.098 di

antaranya yang berada dalam rentang usia 16–18 tahun. Ini bisa menunjukkan bahwa sekitar 8.510 siswa (67.608 - 59.098) berusia di luar rentang 16–18 tahun (baik lebih muda maupun lebih tua), namun tetap berada dalam sistem pendidikan di jenjang yang sesuai.

4.2.2. Tingkat melek huruf

Tingkat melek huruf, Literasi bukan sekadar bisa membaca. literasi adalah kunci dasar pemberdayaan, dan selisih antara laki-laki dan perempuan dalam literasi mencerminkan ketimpangan akses pendidikan dan informasi. Jika perempuan tertinggal dalam literasi, maka kesetaraan gender sulit dicapai di bidang lain seperti pekerjaan, politik, dan kesehatan. Berikut data terbaru terkait tingkat melek huruf di Kota Semarang.

Berdasarkan data dari Portal Semarang Satu Data (Dinas Pendidikan), untuk penduduk usia 15 tahun ke atas di tahun 2023 terdapat 99,80% warga melek huruf dan tahun 2024 terdapat 99,90% warga yang melek huruf. Artinya, hampir semua penduduk dewasa di Semarang sudah bisa membaca dan menulis, dengan peningkatan sebesar +0,1 poin persentase.

Sedangkan tingkat melek huruf berdasarkan jenis kelamin dari hasil tahun 2022 (tahun terakhir yang terpublikasikan)⁹

Tabel 4.10

Tingkat Melek Huruf Berdasarkan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
15-24 tahun	100%	100%	100%
25-44 tahun	99,77%	99,77%	99,77%
45+ tahun	97,00%	97,00%	97,00%
Rata-rata	98,78%	98,78%	98,7%

Sumber : Disdik, Portal Semarang Satu Data, 2025

Dari data diatas terlihat bahwa Tingkat melek huruf sangat tinggi (hampir 100%), menandakan keberhasilan program basic literacy di kota ini. Kenaikan kecil, namun konsisten, menunjukkan upaya pelestarian melek huruf telah berjalan dengan baik. Menurut Dinas Arpusda Kota Semarang,

⁹planet.merdeka.com+10data.semarangkota.go.id+10ayosemarang.com+10ayosemarang.com+3manadopost.jawapos.com+3manadopost.jawapos.com+3

hasil pengukuran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca di Kota Semarang pada tahun 2024¹⁰ sebesar 69,59 pada kategori tinggi. Hal ini menandakan bahwa masyarakat di Kota Semarang memiliki kegemaran membaca yang tinggi. Fokus ke depan bisa diarahkan pada pelestarian membaca intensif (reading habit) serta perluasan literasi digital, khususnya bagi kelompok usia lanjut atau masyarakat yang belum aktif dalam membaca.

Tabel 4.11

**Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut
Kecamatan di Kota Semarang,
Tahun Ajaran 2024/2025**

Kecamatan	SD			Guru			Murid		
	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total
Mijen	24	7	31	255	183	438	5125	3388	8513
Gunung Pati	32	8	40	305	98	403	4915	1313	6228
Banyumanik	31	13	44	390	278	668	7578	4707	12285
Gajah Mungkur	14	7	21	183	109	292	3279	2099	5378
Semarang Selatan	14	15	29	186	196	382	3258	3336	6594
Candisari	16	10	26	262	122	384	4481	1944	6425
Tembalang	21	16	37	372	207	579	7435	3735	11170
Pedurungan	32	17	49	411	322	733	7877	5929	13806
Genuk	17	8	25	244	144	388	4844	2998	7842
Gayamsari	16	5	21	220	52	272	4221	785	5006
Semarang Timur	14	13	27	230	159	389	4295	2310	6605
Semarang Utara	13	20	33	184	191	375	3714	2890	6604
Semarang Tengah	13	20	33	177	255	432	3152	3281	6433
Semarang Barat	27	16	43	399	341	740	7510	4698	12208
Tugu	13	1	14	122	7	129	2133	58	2191
Ngaliyan	28	9	37	373	106	479	6800	1627	8427
Semarang	325	185	510	4313	2770	7083	80617	45098	125715

Sumber : Dinas Arpusda, Portal Semarang Satu Data, 2025

¹⁰ https://arpusda.semarangkota.go.id/uploads/data_karya_ilmiah/20250514111004-2025-05-14data_karya_ilmiah110640.pdf, 6/29/2025

4.2.3. Akses terhadap pendidikan nonformal

Pendidikan nonformal setara SD adalah bentuk layanan pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak atau orang dewasa yang tidak sempat atau tidak dapat mengikuti pendidikan formal (sekolah dasar), agar tetap bisa memperoleh kompetensi dasar yang setara dengan SD. Contoh :

1. Kejar Paket A, B dan C yang diselenggarakan di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) atau LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan);
2. Homeschooling berbasis komunitas.

Di bawah ini terdapat daftar desa/kelurahan yang memiliki fasilitas pendidikan nonformal.

Tabel 4.12

Desa/Kelurahan Yang Memiliki Fasilitas Pendidikan Nonformal

Kecamatan	Desa/Kelurahan Yang Memiliki Fasilitas Pendidikan Nonformal Setara				
	SD	SMP	SMA	SMK	PT
Mijen	14	11	5	3	2
Gunung Pati	16	12	7	5	1
Banyumanik	11	9	8	3	1
Gajah Mungkur	7	3	2	4	5
Semarang Selatan	10	7	5	5	4
Candisari	7	5	2	3	4
Tembalang	12	8	5	2	3
Pedurungan	12	12	8	5	5
Genuk	12	8	6	3	1
Gayamsari	7	5	3	4	3
Semarang Timur	10	7	1	6	4
Semarang Utara	9	7	2	3	1
Semarang Tengah	14	12	7	7	5
Semarang Barat	16	12	8	6	7
Tugu	7	4	3	1	1
Ngaliyan	10	7	5	3	2
Kota Semarang	174	129	77	63	49

Sumber: Dinas Pendidikan, BPS Provinsi Jateng

4.3. Perempuan dan Kesehatan

Kesehatan ibu dan anak merupakan indikator penting dalam menilai kesejahteraan suatu bangsa. Ibu yang sehat akan melahirkan anak yang sehat pula, sehingga keduanya menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi masa depan yang berkualitas. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai program untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, seperti pelayanan antenatal (pemeriksaan kehamilan), imunisasi, pemberian ASI eksklusif, hingga pelayanan persalinan yang aman. Upaya ini juga didukung oleh keberadaan posyandu dan fasilitas kesehatan yang menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa.

Meskipun demikian, tantangan masih cukup besar, terutama di daerah terpencil dan kelompok masyarakat rentan. Kasus kematian ibu dan bayi yang masih terjadi menunjukkan perlunya penguatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, serta peningkatan edukasi mengenai pola hidup sehat dan perawatan selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak. Keterlibatan keluarga, tenaga kesehatan, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan setiap ibu dan anak memperoleh hak atas kesehatan yang optimal. Dengan demikian, pembangunan kesehatan ibu dan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga seluruh elemen bangsa.

Merujuk pada data dibawah terdapat angka kelahiran bayi hidup sangat tinggi sebanyak 17.401 bayi, terdiri dari 9.044 bayi berjenis kelamin laki-laki dan 8.357 bayi perempuan. Namun masih terdapat 101 bayi lahir mati (terdiri dari 69 laki-laki dan 32 perempuan). Proporsi bayi mati terhadap total kelahiran sekitar 0,58%, tergolong moderat tapi tetap perlu intervensi preventif. Secara umum, angka kematian bayi mati (stillbirth rate) di bawah 1% dianggap tidak terlalu tinggi, terutama di negara berkembang. Namun, angka idealnya adalah 0%—karena setiap kematian bayi merupakan kejadian serius. Jadi, meskipun tidak tergolong tinggi secara statistik, angka 0,58% tetap menunjukkan adanya tantangan dalam kesehatan ibu dan janin, misalnya : Gizi ibu buruk; Infeksi selama kehamilan; Hipertensi atau diabetes yang tidak terkontrol; Pelayanan prenatal yang tidak optimal. Untuk itu perlu langkah pencegahan agar angka bayi mati bisa ditekan lebih rendah;

kesehatan ibu hamil lebih terpantau; risiko komplikasi selama kehamilan atau persalinan bisa dikurangi.

Tabel 4.13
Kesehatan Ibu dan Anak
Tahun 2024

NO	URAIAN	L	P	JML	SATUAN
1	Kelahiran bayi hidup	9.044	8.357	17.401	bayi
2	Kelahiran bayi mati	69	32	101	bayi
3	Kematian Ibu				
	Ibu hamil			2	ibu
	Ibu Bersalin			0	ibu
	Ibu Nifas			12	ibu
4	Kematian Bayi dan Balita				
	Bayi	76	63	139	bayi
	Balita	12	7	19	balita
5	Balita stunting (per Des'24)			845	bayi

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2024

Kasus kematian ibu hamil dan nifas ada 14 kasus, dengan dominasi pada masa nifas (12 kasus), sedangkan kematian saat bersalin 0 kasus. Ini menandakan pelayanan saat persalinan di Kota Semarang cukup baik. Tetapi perlu dicatat bahwa tingginya kematian pada masa nifas menunjukkan perlunya peningkatan pemantauan pasca persalinan.

Total kematian anak usia 0-59 bulan: 158 kasus. Mayoritas kematian terjadi pada bayi (88%), artinya intervensi pada masa neonatal dan awal kehidupan sangat krusial.

Sedangkan dalam kasus Stunting, jumlah 845 balita stunting menunjukkan perhatian serius masih dibutuhkan. Program intervensi gizi, ASI eksklusif, dan sanitasi perlu ditingkatkan.

Dalam pelayanan kesehatan ibu hamil telah dilaksanakan dengan hasil seperti tampak pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.14
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu

Indikator	Cakupan
Jumlah ibu hamil	18.338 ibu
Ibu hamil mendapat tablet tambah darah	100%
Kunjungan K1 (awal kehamilan)	100%
Kunjungan K4 (minimal 4 kali)	103,8%
Kunjungan K6 (nifas)	100%
Persalinan di fasilitas kesehatan (Fasyankes)	100%
Ibu nifas mendapat vitamin A	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025

Cakupan pelayanan sangat baik (100% atau lebih) di semua indikator. Namun meski cakupan baik, masih terjadi kematian pada ibu nifas, menandakan kualitas pelayanan atau tindak lanjut mungkin belum maksimal.

Tabel 4.15
Pengguna KB berdasar Jenis Alat Kontrasepsi

No	Jenis Alat Kontrasepsi	Jumlah	Pengguna
1	Kondom	3.489	Laki-laki
2	Suntik	4.537	Perempuan
3	Pil	964	Perempuan
4	AKDR (IUD)	1.408	Perempuan
5	MOP (Medis Operasi Pria)	2	Laki-laki
6	MOW (Medis Operasi Wanita)	701	Perempuan
7	Implan	1.025	Perempuan
8	Mal (Metode Amenorea Laktasi)	625	Perempuan

Sumber: Dinas Kesehatan, BKKBN 2024

Terlihat jelas bahwa perempuan mendominasi pemakaian alat kontrasepsi dengan rincian : Total pengguna KB perempuan: 9.260 (72,6%) dan Total pengguna KB laki-laki: 3.491 (27,4%). Sedangkan alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah : Suntik (4.537), oleh perempuan); sedangkan laki-laki adalah Kondom (3.489).

Ditinjau dari pemakai alat kontrasepsi tampak bahwa MOP (sterilisasi pada laki-laki) sangat rendah, hanya 2 pengguna hal ini menunjukkan

minimnya partisipasi laki-laki dalam metode permanen dan kemungkinan pemakai tidak memberi jawaban yang benar karena adanya stigma bahwa pria yang menjalani MOP dianggap "tidak jantan" atau "tidak produktif lagi".

Data diatas menggambarkan bahwa mayoritas tanggung jawab KB masih dibebankan pada perempuan. Hal ini menunjukkan kurangnya keterlibatan laki-laki yang bisa disebabkan oleh :

- a) Kurangnya informasi dan edukasi KB untuk pria
- b) Norma budaya atau stigma terhadap pria pengguna KB
- c) Akses dan pilihan metode yang terbatas untuk pria

Oleh karena itu, agar di masa depan keterlibatan laki-laki dalam penggunaan alat kontrasepsi seimbang, maka :

- a) keterlibatan laki-laki dalam program KB perlu ditingkatkan, khususnya untuk metode jangka panjang seperti MOP.
- b) Perlu upaya edukasi berbasis gender dan peningkatan layanan kontrasepsi yang melibatkan laki-laki secara aktif.

4.4. Perempuan, Tenaga Kerja dan Ekonomi

Tahun 2024, penduduk usia kerja di kota Semarang mencapai 1.354.593 jiwa yang terdiri dari 663.632 jiwa atau 49 persen laki laki dan 690.961 jiwa atau 51 persen perempuan. Dari jumlah tenaga kerja tersebut kita akan melihat tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Semarang.

Tabel 4.16

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2024**

KOTA	Angka Harapan Hidup (AHH)			
	Laki-laki		Perempuan	
SEMARANG	2023	2024	2023	2024
	78,56	79,92	60,64	60,24

Sumber : BPS Kota Semarang, 2025

Hasil dari gambaran tabel diatas menunjukkan :

1. TPAK Laki-laki meningkat. Tahun 2023: 78,56%, Tahun 2024: 79,92%. Terjadi peningkatan 1,36 poin persentase., Artinya, proporsi laki-laki usia kerja yang aktif dalam pasar kerja bertambah.

2. TPAK Perempuan sedikit menurun. Tahun 2023: 60,64%, Tahun 2024: 60,24%. Terjadi penurunan 0,4 poin persentase. Meskipun kecil, hal ini menunjukkan sedikit penurunan partisipasi perempuan di pasar kerja.
3. Kesenjangan Gender. Tahun 2023: 17,92 poin (78,56 - 60,64), Tahun 2024: 19,68 poin (79,92 - 60,24). Kesenjangan partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan meningkat dari 17,92 menjadi 19,68 poin..

Secara keseluruhan, partisipasi laki-laki dalam angkatan kerja meningkat, sementara partisipasi perempuan sedikit menurun. Kesenjangan gender dalam TPAK membesar, yang bisa menjadi indikator bahwa kesetaraan akses perempuan ke pasar kerja perlu ditingkatkan. Perlu analisis lebih lanjut mengenai faktor penyebab turunnya TPAK perempuan (misalnya: beban domestik, akses pendidikan/pekerjaan, atau kebijakan ketenagakerjaan yang belum inklusif gender).

Berikut ditunjukkan data mengenai gambaran tenaga kerja di Kota Semarang.

Tabel 4.17
Tenaga Kerja di Kota Semarang
Tahun 2024

No	Nama Data	Total
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	69.88%
2	Tenaga Kerja Migran (orang)	
	* Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	-
	* Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	295
3	Pekerja di Sektor Formal	544,649
4	Pekerja di Sektor Informal (orang)	346,848
5	Pengangguran (orang)	55,656
6	Pekerja Tak Dibayar	53,523
7	Perempuan pekerja, profesional dan mandiri	380,098
8	Pekerja menurut lapangan usaha, status pekerjaan dan jenis pekerjaan (orang)	891,497

Sumber : Disnaker Kota Semarang, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Semarang sebesar 69,88%, artinya hampir 70 dari 100 penduduk usia kerja berpartisipasi di pasar kerja. Namun data ini belum dirinci berdasarkan gender, sehingga kita tidak tahu apakah partisipasi perempuan mendekati laki-laki atau tidak. Biasanya, partisipasi perempuan cenderung lebih rendah.

AKAN (Antar Kerja Antar Negara): 295 orang. Tidak ada data AKAD (Antar Daerah). Secara nasional, perempuan cenderung dominan dalam TKI (Tenaga Kerja Indonesia), khususnya ke luar negeri, biasanya dalam sektor informal (misalnya pembantu rumah tangga, perawat lansia, dll).

Sektor Formal: 544.649 orang. Sektor Informal: 346.848 orang. Catatan Gender: Perempuan sering kali lebih banyak bekerja di sektor informal karena fleksibilitas waktu, namun ini berarti mereka cenderung: Kurang mendapat jaminan kerja; Rentan terhadap eksploitasi; Kurang akses terhadap pelatihan dan perlindungan hukum

Pengangguran: 55.656 orang. Pengangguran perempuan sering kali lebih tinggi karena keterbatasan akses, diskriminasi, dan beban ganda (pekerjaan domestik).

Pekerja tak dibayar umumnya adalah perempuan yang bekerja membantu usaha keluarga, bertani, berdagang, tanpa upah tetap. Hal ini menunjukkan ketimpangan akses terhadap ekonomi produktif dan penghargaan terhadap kontribusi perempuan.

Perempuan pekerja, profesional dan mandiri: 380.098 orang. Angka ini cukup besar dan menunjukkan peran aktif perempuan dalam dunia kerja. Namun, tanpa pembandingan laki-laki, kita tidak bisa menilai kesetaraan.

Jika dibandingkan dengan perempuan pekerja sebanyak 380.098 orang, maka persentase perempuan pekerja $\approx 42,6\%$.

Dari data persentase tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Perempuan sudah cukup tinggi kontribusinya dalam dunia kerja (42,6%)
2. Ada partisipasi perempuan dalam sektor profesional dan mandiri

Banyak perempuan kemungkinan berada di sektor informal & tidak dibayar. Tidak adanya data terpilah berdasarkan jenis kelamin di sebagian besar indikator menyulitkan analisis lebih dalam. Perlu penguatan pelatihan, perlindungan hukum, dan akses pembiayaan untuk pekerja perempuan.

Penting bagi pemerintah menyediakan data terpilah gender agar bisa merancang kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Tabel 4.18
Penduduk Usia Kerja di Kota Semarang
Tahun 2024

No	Penduduk	L	P	Jumlah
1	Bekerja	511,399	380,098	891,497
2	Pengangguran	18,996	36,125	55,121
3	Bukan Angkatan Kerja	133,237	274,738	407,975
Jumlah		663,632	690,961	1,354,593

Sumber : Disnaker Kota Semarang, 2025

Jumlah angkatan kerja didapat dari masyarakat yang bekerja ditambah masyarakat pengangguran, maka dapat dihitung tingkat pengangguran. Laki-laki: $511.399 + 18.996 = 530.395$; Perempuan: $380.098 + 36.125 = 416.223$.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja atau mencari pekerjaan, dibandingkan dengan total penduduk usia kerja. TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Tampak pada data diatas bahwa besaran TPAK Laki-laki = $(530.395 / 663.632) \times 100 \approx 79.95\%$. sedangkan TPAK Perempuan = $(416.223 / 690.961) \times 100 \approx 60.24\%$. hasil penghitungan TPAK menunjukkan bahwa perempuan di Kota Semarang memiliki tingkat partisipasi kerja yang jauh lebih rendah dibanding laki-laki (selisih hampir 20%). Ini menunjukkan bahwa masih banyak perempuan usia kerja yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi formal/informal.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja pada suatu periode tertentu. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa banyak angkatan kerja yang tidak terserap. Data diatas menunjukkan TPT Laki-laki = $(18.996 / 530.395) \times 100 \approx 3.58\%$, sedangkan TPT Perempuan = $(36.125 / 416.223) \times 100 \approx 8.68\%$. hasil penghitungan tersebut menunjukkan bahwa

Perempuan tidak hanya berpartisipasi lebih rendah dalam angkatan kerja, tetapi juga memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi.

Bukan Angkatan Kerja adalah kelompok penduduk usia kerja (umumnya 15 tahun ke atas) yang tidak bekerja dan tidak sedang mencari pekerjaan. Mereka mungkin sedang sekolah, mengurus rumah tangga, pensiun, atau memiliki alasan lain yang menyebabkan mereka tidak aktif dalam pasar tenaga kerja. data angka diatas menunjukkan Laki-laki: 133.237 → hanya 20% dari total laki-laki usia kerja, sedangkan Perempuan: 274.738 → mencapai 39.75% dari total perempuan usia kerja. Ini menunjukkan banyak perempuan yang tidak aktif secara ekonomi. Pada umumnya penyebab perempuan tidak aktif secara ekonomi adalah :

- a) Beban domestik (mengurus rumah tangga/anak)
- b) Kurangnya akses ke pekerjaan layak
- c) Faktor budaya/persepsi gender

Perempuan usia kerja di Kota Semarang lebih banyak jumlahnya, tetapi lebih sedikit yang bekerja. Tingkat partisipasi kerja perempuan masih tertinggal jauh dari laki-laki. Pengangguran perempuan dua kali lipat lebih tinggi dari laki-laki. Banyak perempuan masuk kategori bukan angkatan kerja, menunjukkan potensi ekonomi yang belum dimaksimalkan.

Dalam sudut pandang kebijakan gender perlu adanya program :

- a) Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan & kewirausahaan.
- b) Akses pengasuhan anak (daycare) agar perempuan bisa bekerja.
- c) Kampanye kesetaraan peran gender dalam pekerjaan dan rumah tangga.
- d) Peningkatan akses perempuan ke sektor formal & teknologi.

Tabel 4.19
Tingkat Kesempatan Angkatan Kerja
Tahun 2024

Uraian		Keterangan	L	P	Jumlah
Bekerja	Angkatan kerja	orang	530,395	416,223	946,618
	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	%	3.58%	8.68%	5.82%
	TKK (Tingkat Kesempatan Kerja)	%	96.42%	91.32%	94.18%

Sumber : Disnaker Kota Semarang, 2025

Berikut dapat dilihat mengenai data tingkat kesempatan angkatan kerja tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin, tampak total angkatan kerja ada 946.618 orang dengan pembagian laki-laki (L): 530.395 orang (56%) dan perempuan (P): 416.223 orang (44%). secara garis besar dari angka diatas kita dapat menyimpulkan bahwa partisipasi laki-laki dalam angkatan kerja di Kota Semarang lebih tinggi daripada perempuan.

Dalam data mengenai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan bahwa TPT laki-laki sebesar 3,58% dan perempuan sebesar 8,68%. sehingga secara keseluruhan terdapat TPT di wilayah tersebut sebesar 5,82% dengan hasil perempuan memiliki tingkat pengangguran 2,4 kali lebih tinggi daripada laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun cukup banyak perempuan masuk dalam angkatan kerja, mereka lebih sulit memperoleh pekerjaan dibanding laki-laki.

Terdapat penghitungan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) laki-laki sebesar 96,42% sedangkan TKK perempuan sebesar 91,32% sehingga total TKK adalah 94,18%. Artinya tingkat kesempatan kerja perempuan lebih rendah 5,1% dibanding laki-laki. Ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses atau peluang kerja, yang bisa disebabkan oleh :

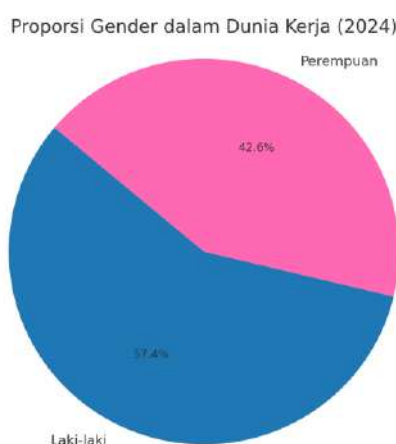
- a) Kesenjangan keterampilan,
- b) Diskriminasi gender di tempat kerja,
- c) Beban ganda perempuan (rumah tangga dan kerja),
- d) Kurangnya akses ke sektor pekerjaan formal.

Secara keseluruhan, hasil TKK Kota Semarang menunjukkan bahwa laki-laki mendominasi angkatan kerja dan memiliki peluang kerja yang lebih besar. Sedangkan perempuan menghadapi tantangan yang lebih tinggi dalam memperoleh pekerjaan (terlihat dari TPT yang tinggi dan TKK yang lebih rendah). Oleh sebab itu perlunya kebijakan afirmatif dan program peningkatan keterampilan kerja yang responsif gender untuk mendorong keseimbangan partisipasi dan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan.

4.4.1. Proporsi Gender dalam dunia kerja

Proporsi gender dalam dunia kerja merupakan indikator penting untuk mengukur kesetaraan dan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam aktivitas ekonomi. Meskipun terjadi peningkatan partisipasi perempuan di berbagai sektor pekerjaan, kesenjangan gender masih terlihat jelas, terutama dalam hal akses terhadap posisi strategis, tingkat pendapatan, dan jenis pekerjaan. Laki-laki umumnya mendominasi sektor formal dan pekerjaan yang berorientasi pada teknologi atau kepemimpinan, sementara perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal, domestik, atau pekerjaan dengan penghasilan rendah. Hambatan budaya, tanggung jawab rumah tangga, serta akses terbatas terhadap pendidikan dan pelatihan menjadi faktor utama yang memengaruhi partisipasi kerja perempuan. Oleh karena itu, upaya peningkatan proporsi gender yang setara dalam dunia kerja perlu didukung dengan kebijakan afirmatif, pemberdayaan perempuan, serta penyediaan fasilitas kerja yang ramah gender.

Grafik 4.1
Proporsi Gender Dalam Dunia Kerja
Tahun 2024



Tabel 4.20
Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan
Tahun 2024

No	Lap. Kerja	L	P	Jumlah
1	Pertanian	15,209	4,362	19,571
2	Manufaktur	154,657	91,715	246,372
3	Jasa	341,533	284,021	625,554
Jumlah		511,399	380,098	891,497

Sumber : Disnaker Kota Semarang, 2025

Data diatas menunjukkan total penduduk yang bekerja sesuai lapangan pekerjaannya adalah : Laki-laki (L): 511.399 orang ($\approx 57,34\%$) dan Perempuan (P): 380.098 orang ($\approx 42,66\%$) sehingga jumlah keseluruhannya adalah : 891.497 orang. Dari data tersebut tampak bahwa masih terdapat kesenjangan gender dalam lapangan kerja, di mana laki-laki lebih banyak bekerja dibanding perempuan.

Dilihat dari lapangan pekerjaannya, sektor jasa adalah penyerap tenaga kerja terbesar untuk kedua gender, terutama perempuan (74,7% dari total pekerja perempuan); Sektor pertanian paling timpang secara gender, didominasi laki-laki (sektor pertanian masih sangat maskulin, kemungkinan

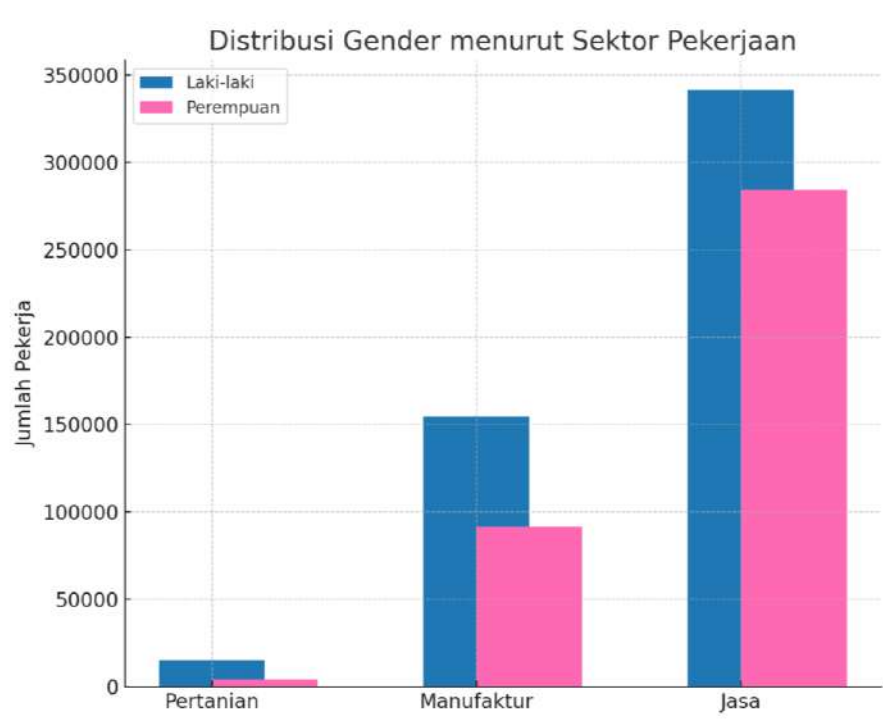
terkait beban fisik atau norma sosial); Sektor manufaktur masih didominasi laki-laki, tapi dengan proporsi perempuan yang cukup signifikan.

Dilihat dari proporsi gender dalam masing-masing kelompok lapangan kerja tampak dari seluruh laki-laki yang bekerja, mayoritas ada di sektor jasa (66,8%) dan dari seluruh perempuan yang bekerja, 74,7% berada di sektor jasa.

Dari keseluruhan bagian, kesenjangan gender dalam dunia kerja masih terlihat, dengan laki-laki mendominasi hampir di semua sektor. Sektor jasa adalah penyerap utama tenaga kerja perempuan. Pertanian masih merupakan sektor yang sangat maskulin, kemungkinan karena beban fisik atau persepsi sosial.

Grafik berikut menampilkan proporsi gender secara keseluruhan serta distribusinya dalam sektor pertanian, manufaktur, dan jasa.

Grafik 4.2
Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan
Tahun 2024



Penduduk usia kerja yang bekerja menurut status pekerjaan mencerminkan struktur ketenagakerjaan dalam suatu wilayah dan menggambarkan bagaimana masyarakat terdistribusi dalam berbagai bentuk hubungan kerja. Status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh

tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian dan pekerja keluarga digunakan sebagai penghitungan pekerja sektor informal. Sedangkan pekerja sektor formal adalah mereka yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan.

Mayoritas penduduk usia kerja di Indonesia masih didominasi oleh pekerja informal, seperti pekerja bebas di sektor pertanian maupun non-pertanian, yang umumnya tidak memiliki perlindungan kerja dan kepastian pendapatan. Sementara itu, pekerja formal seperti buruh/karyawan cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap upah tetap, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang layak. Analisis status pekerjaan penting untuk memahami kualitas pekerjaan yang tersedia serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.

Tabel dibawah menunjukkan data mengenai penduduk usia kerja yang bekerja menurut status pekerjaannya.

Tabel 4.21

**Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan
Tahun 2024**

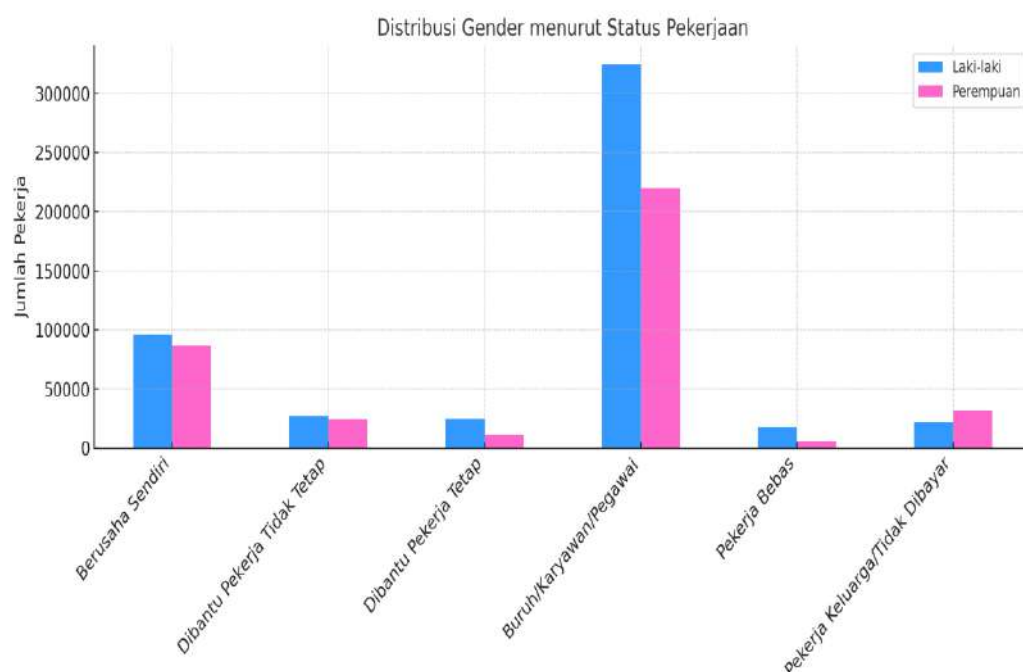
No	Status Pekerjaan	L	P	Jumlah	Dominasi Gender
1	Berusaha Sendiri	95,535	86,791	182,326	Hampir seimbang
2	Berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	27,307	24,282	51,589	Hampir seimbang
3	Berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar	24,681	11,157	35,838	Laki-laki
4	Buruh/karyawan/pegawai	324,760	219,889	544,649	Laki-laki
5	Pekerja bebas	17,498	6,074	23,572	Laki-laki
6	Pekerja keluarga/tidak dibayar	21,618	31,905	53,523	Perempuan
Jumlah		511,399	380,098	891,497	

Sumber : Disnaker Kota Semarang, 2025

Data diatas menunjukkan proporsi total gender, laki-laki: 511.399 orang (57,4%), perempuan: 380.098 orang (42,6%). Beberapa catatan terkait dengan data tabel diatas adalah :

- Buruh/karyawan/pegawai adalah status pekerjaan dominan bagi kedua gender.
- Pekerja keluarga/tidak dibayar memiliki jumlah perempuan paling tinggi dibanding laki-laki → menandakan kerentanan dan ketimpangan dalam akses pekerjaan berbayar bagi perempuan.
- Perempuan lebih banyak berada di sektor informal atau pekerjaan tak dibayar, seperti pekerja keluarga.

Grafik 4.3
Distribusi Gender Menurut Status Pekerjaan



Berdasarkan grafik distribusi gender menurut status pekerjaan, terlihat adanya ketimpangan gender yang cukup signifikan pada beberapa kategori pekerjaan. Berikut adalah analisis gender berdasarkan grafik tersebut :

- Buruh/Karyawan/Pegawai merupakan kategori dengan jumlah pekerja terbanyak untuk kedua gender. Namun, laki-laki mendominasi dengan jumlah lebih tinggi dibanding perempuan, menunjukkan masih kuatnya dominasi laki-laki dalam sektor formal atau berbayar tetap.

2. Pada kategori Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar, jumlah perempuan jauh lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini mencerminkan kecenderungan perempuan lebih banyak terlibat dalam pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan tidak dibayar, yang sering kali tidak dihargai secara ekonomi.
3. Pekerja Bebas, Dibantu Pekerja Tidak Tetap, dan Dibantu Pekerja Tetap juga menunjukkan dominasi laki-laki, meskipun dalam angka yang relatif kecil. Ini bisa mencerminkan keterbatasan akses atau kesempatan perempuan untuk masuk ke sektor pekerjaan fleksibel atau informal.
4. pada kategori Berusaha Sendiri, jumlah laki-laki dan perempuan relatif seimbang, menandakan bahwa sektor wirausaha bisa menjadi ruang yang lebih inklusif secara gender.

Secara umum, grafik ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan aktif dalam dunia kerja, mereka cenderung lebih banyak berada dalam posisi yang kurang stabil, kurang dibayar, atau bahkan tidak dibayar. Hal ini menandakan perlunya kebijakan afirmatif yang mendorong kesetaraan akses dan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor.

Sudut pandang tenaga kerja menurut jenjang pendidikan merupakan salah satu faktor fundamental yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas tenaga kerja dalam suatu negara. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh seseorang, semakin besar pula peluangnya untuk memperoleh pekerjaan yang layak, berpenghasilan tinggi, dan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, distribusi tenaga kerja menurut jenjang pendidikan dapat memberikan gambaran mengenai struktur kualitas sumber daya manusia suatu wilayah.

Tabel 4.22
Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2024

Jenjang Pendidikan	Laki- laki			Perempuan		
	Bekerja	Pengangguran	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran	Angkatan Kerja
SD	69,577	1,469	71,046	71,243	2381	70,403
SMP	59,728	905	60,633	44,565	2,669	60,584
SMA Umum	126,783	5,553	132,336	72,458	10,431	90,634
SMA Kejuruan	126,835	6,880	133,715	71,468	10,581	70,058
Diploma I/II/III	29,434	1067	30,501	31,177	2,132	31,964
Universitas	99,042	3,122	102,164	89,187	7,931	90,275
Total	511,399	18,996	530,395	380,098	36,125	413,918

Sumber : Disnaker Kota Semarang, 2025

Berdasarkan Tabel Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2024 di Kota Semarang, terdapat beberapa temuan penting terkait distribusi tenaga kerja berdasarkan gender: Partisipasi Tenaga Kerja Laki-laki secara keseluruhan mendominasi angkatan kerja dengan total 530.395 orang, sementara perempuan berjumlah 413.918 orang. Selisih ini menunjukkan bahwa partisipasi tenaga kerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki, yang bisa disebabkan oleh tanggung jawab domestik, norma sosial, atau akses kerja yang belum merata.

Pada bagian tingkat pengangguran, meskipun angkatan kerja perempuan lebih sedikit, jumlah pengangguran perempuan lebih tinggi di beberapa jenjang pendidikan. Misalnya, pada tingkat SMA Umum, laki-laki menganggur ada 5.553 orang sedangkan perempuan menganggur: 10.431 orang. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan, terutama dengan pendidikan menengah, lebih rentan terhadap pengangguran dibanding laki-laki.

Pada jenjang universitas, jumlah perempuan bekerja (87.197) sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki (99.042), tetapi tetap menunjukkan partisipasi signifikan perempuan dalam pendidikan tinggi. Meskipun demikian, angka pengangguran perempuan lulusan universitas (7.513) juga masih tinggi, menunjukkan tantangan dalam akses kerja berkualitas bagi lulusan perempuan.

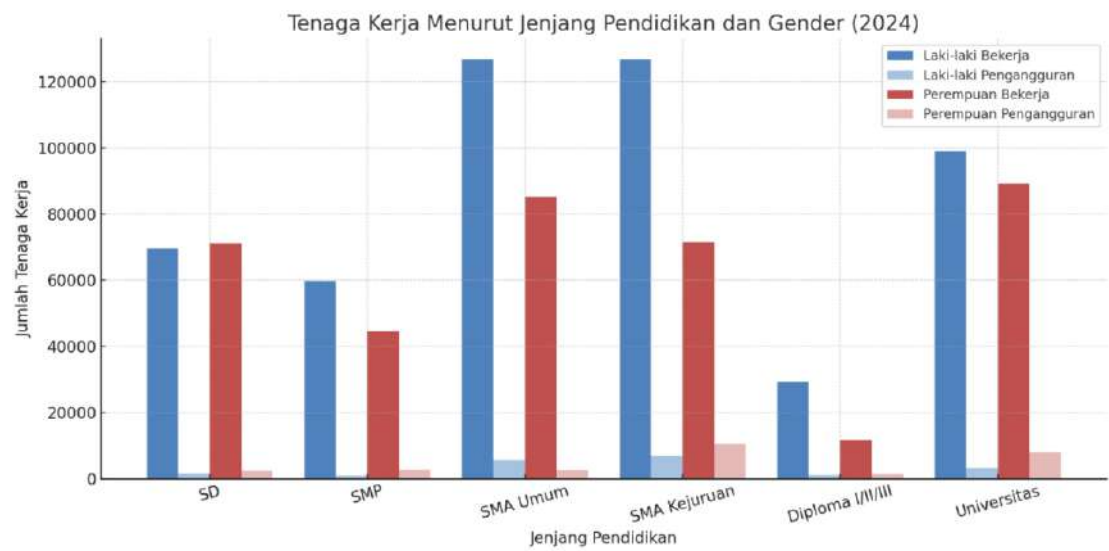
Secara keseluruhan dominasi gender berdasarkan jenjang pendidikan menunjukkan bahwa laki-laki mendominasi di seluruh jenjang, terutama pada SMA Kejuruan dan SMA Umum, baik dalam hal jumlah bekerja maupun total angkatan kerja. Perempuan lebih banyak bekerja di jenjang pendidikan rendah seperti SD, tetapi juga menunjukkan keterlibatan yang cukup tinggi di pendidikan tinggi.

Dalam hal ini, perempuan masih menghadapi tantangan lebih besar dalam dunia kerja meskipun memiliki latar belakang pendidikan yang relatif tinggi. Tingginya pengangguran di kalangan perempuan, terutama lulusan SMA dan universitas, mengindikasikan perlunya kebijakan afirmatif untuk menciptakan peluang kerja yang lebih adil dan setara, serta penguatan program pelatihan kerja yang responsif gender. Selain itu, rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga menunjukkan masih adanya hambatan struktural dan sosial yang membatasi kontribusi perempuan dalam pembangunan ekonomi.

Tingkat Partisipasi Bekerja per Jenjang Pendidikan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan total angkatan kerja pada masing-masing jenjang pendidikan, yang menggambarkan seberapa besar lulusan dari setiap jenjang pendidikan terserap dalam dunia kerja. Indikator ini penting untuk melihat efektivitas sistem pendidikan dalam mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai serta menilai kesesuaian antara kualifikasi pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Berikut tampak data mengenai tingkat partisipasi bekerja per jenjang pendidikan.

Bila dilihat lebih jauh mengenai tenaga kerja menurut jenjang pendidikan dalam bentuk grafik akan tampak seperti dibawah ini

Grafik 4.4
Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2024



Tabel 4.23
Tingkat Partisipasi Bekerja per Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Bekerja Laki-laki	Bekerja Perempuan	Persentase Bekerja Laki-laki	Persentase Bekerja Perempuan
SD	69,577	71,243	97,9%	101,2%*
SMP	59,728	44,565	98,5%	73,6%
SMA Umum	126,783	72,458	95,8%	79,9%
SMA Kejuruan	126,835	71,468	95,0%	95,5%
Diploma I/II/III	29,434	31,177	95,4%	97,5%
Universitas	99,042	89,187	96,9%	91,3%

Sumber : Disnaker Kota Semarang, 2025

Hasil dari data diatas menunjukkan bahwa :

1. perempuan lebih banyak bekerja di tingkat SD dibanding total angkatan kerja yang mengindikasikan dominasi perempuan di pekerjaan informal/rendah pendidikan. Tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi di semua jenjang dibanding laki-laki.
2. Lulusan Diploma dan Universitas memiliki tingkat kerja tinggi, baik laki-laki maupun perempuan.
3. Perempuan lulusan SMA Umum dan SMP memiliki tingkat pengangguran relatif tinggi.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a) Akses pendidikan tinggi berperan besar dalam meningkatkan kesempatan kerja untuk kedua gender.
- b) Perlu intervensi pada perempuan lulusan SMP dan SMA umum, karena tingkat penganggurannya relatif tinggi.
- c) Kesenjangan gender masih terjadi, namun mulai mengecil di tingkat pendidikan tinggi.

4.4.2. Tenaga Kerja Disabilitas

Tenaga kerja disabilitas merupakan bagian penting dari dunia kerja yang memiliki potensi dan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Meskipun menghadapi berbagai tantangan fisik, sensorik, mental, maupun intelektual, individu penyandang disabilitas tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan inklusif. Pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi dan kebijakan telah mendorong perusahaan untuk memberikan kesempatan kerja yang adil bagi penyandang disabilitas, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Keberadaan tenaga kerja disabilitas dalam berbagai sektor kerja tidak hanya menunjukkan kemajuan dalam inklusi sosial, tetapi juga memperkaya lingkungan kerja dengan perspektif dan keterampilan yang unik. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat hambatan yang cukup besar, seperti diskriminasi, kurangnya aksesibilitas fasilitas kerja, serta rendahnya tingkat pendidikan dan pelatihan vokasional bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem kerja

yang ramah disabilitas. Penyediaan pelatihan yang relevan, adaptasi teknologi kerja, serta kampanye kesadaran publik menjadi langkah penting agar tenaga kerja disabilitas dapat lebih diberdayakan. Dengan membuka akses seluas-luasnya kepada kelompok disabilitas, maka dunia kerja akan menjadi lebih inklusif, adil, dan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Pemerintah Daerah Kota Semarang menanggapi keberadaan disabilitas, maka Pemda Kota Semarang selalu berupaya mensosialisasikan tentang peluang kerja untuk kaum disabilitas. Terbukti di setiap tahun terjadi penambahan jumlah tenaga kerja disabilitas.

Tabel 4.24

Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas di Kota Semarang 2024

No	URAIAN	TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas	95	95	188	230	255	298

Sumber : Disnaker Kota Semarang, 2025

Bila dibuat dalam bentuk grafik dapat dilihat pertumbuhan tenaga kerja disabilitas di Kota Semarang dari tahun 2019 hingga 2024.

Grafik 4.5

Pertumbuhan Tenaga Kerja Disabilitas Kota Semarang



Dalam melakukan analisa grafik tampak :

1. Di tahun 2019–2020: Tidak ada pertumbuhan (tetap di angka 95).
2. 2020–2021: Lonjakan besar sebanyak +98,9%, dari 95 ke 188. Kemungkinan akibat program pasca pandemi atau inisiatif inklusif yang baru dimulai.
3. 2021–2022: Pertumbuhan sebesar +22,3%, menunjukkan tren positif yang berlanjut.
4. 2022–2023: Pertumbuhan melambat menjadi +10,9%, tapi tetap naik.
5. 2023–2024: Pertumbuhan kembali naik menjadi +16,9%.

Jadi, secara keseluruhan, jumlah tenaga kerja disabilitas meningkat lebih dari 3 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2021 menjadi titik balik, menunjukkan upaya besar dalam penyerapan tenaga kerja disabilitas. Pertumbuhan konsisten setiap tahun setelah itu menunjukkan adanya keberlanjutan program inklusif di Kota Semarang.

4.5. Perempuan dan Koperasi

Perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan koperasi, baik sebagai anggota, pengelola, maupun pelaku usaha produktif. Koperasi menjadi wadah yang mampu memberdayakan perempuan, khususnya dalam meningkatkan kemandirian ekonomi, memperluas akses terhadap pembiayaan, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan ekonomi di tingkat komunitas. Di banyak daerah, koperasi perempuan telah terbukti mampu menjadi motor penggerak ekonomi keluarga dan lokal, dengan mengembangkan usaha kecil, kerajinan, serta produk berbasis potensi wilayah. Namun demikian, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses informasi, pelatihan, dan kepemimpinan dalam koperasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan inklusi perempuan dalam kelembagaan koperasi perlu terus ditingkatkan guna mewujudkan koperasi yang adil gender, berdaya saing, dan berkelanjutan. Peran penting perempuan tampak dari hasil data perempuan dan koperasi dibawah ini

Tabel 4.25
Perempuan dan Koperasi
Tahun 2024

NO	Uraian Indikator	L	P	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Koperasi Aktif			577	Kop
2	Jumlah Anggota Koperasi Aktif	67,127	70,550	137,677	Org
3	Jumlah Manajer Koperasi	141	68	209	Org
4	Jumlah Karyawan Koperasi	1,696	666	2,362	Org
5	Jumlah Koperasi Wanita / Perempuan			38	Kop
6	Jumlah Anggota Koperasi Wanita / Perempuan	5	5,219	5,284	Org
7	Jumlah Usaha Mikro	9,611	20,810	30,421	Usaha
8	Jumlah Usaha kecil	0	0	0	Usaha
9	Jumlah Usaha Menengah	0	0	0	Usaha
10	Jumlah Pelaku Usaha Mikro	9,611	20,810	30,421	Org
11	Jumlah Pelaku Usaha Kecil	0	0	0	Org
12	Jumlah Pelaku Usaha Menengah	0	0	0	Org
13	Jumlah UMKM Binaan	9,611	20,810	30,421	Usaha
14	Jumlah Pelaku (Pemilik) UMKM Binaan	9,611	20,810	30,421	Org
15	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Binaan	12,893	23,724	36,617	Org
16	Jumlah Bank sampah			500	usaha

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

Jumlah anggota koperasi aktif, Laki-laki: 67.127 orang (48,7%); Perempuan: 70.550 orang (51,2%). Anggota koperasi perempuan sedikit lebih banyak daripada laki-laki, menunjukkan keterlibatan aktif perempuan dalam keanggotaan koperasi. Data menunjukkan bahwa anggota koperasi perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki, dengan selisih sekitar

3.423 orang. Persentase perempuan yang mencapai 51,2% dari total anggota mencerminkan bahwa perempuan tidak hanya hadir, tetapi juga mulai mendominasi dalam keanggotaan koperasi. Ini menunjukkan bahwa koperasi menjadi salah satu sarana yang diminati perempuan dalam mengakses peluang ekonomi, termasuk simpan pinjam, pelatihan, dan jaringan usaha. Fakta ini menjadi indikator positif bahwa kesadaran dan partisipasi perempuan terhadap penguatan ekonomi kolektif semakin meningkat.

Lebih lanjut, tingginya jumlah anggota perempuan juga bisa mencerminkan keberhasilan program-program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun lembaga koperasi itu sendiri. Koperasi, sebagai lembaga ekonomi rakyat, telah menjadi ruang inklusif yang mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan produktif. Namun, meskipun keanggotaan perempuan tinggi, masih perlu ditelusuri lebih lanjut sejauh mana perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan koperasi, seperti dalam kepengurusan, manajemen, dan peran strategis lainnya. Dengan demikian, angka partisipasi ini dapat menjadi dasar untuk merancang strategi lanjutan guna memperkuat kepemimpinan perempuan dalam koperasi.

Jumlah karyawan koperasi yang terdiri dari 1.656 laki-laki dan 666 perempuan menunjukkan bahwa perempuan hanya mencakup sekitar 28,7% dari total tenaga kerja. Ketimpangan ini menggambarkan rendahnya partisipasi perempuan dalam sektor koperasi, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti akses yang terbatas terhadap kesempatan kerja, stereotip gender, atau kurangnya kebijakan yang mendukung kesetaraan di lingkungan kerja koperasi. Angka ini memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan dalam dunia kerja koperasi masih jauh dari proporsi ideal yang setara.

Ketimpangan gender dalam tenaga kerja ini dapat berdampak pada dinamika organisasi secara keseluruhan, termasuk dalam pengambilan keputusan dan perspektif yang diakomodasi oleh koperasi. Kurangnya representasi perempuan dapat menghambat inovasi dan keadilan sosial dalam organisasi. Oleh karena itu, penting bagi koperasi untuk mendorong kebijakan inklusif dan kesetaraan gender, seperti memberikan pelatihan bagi perempuan, memperluas rekrutmen yang ramah gender, dan menciptakan

lingkungan kerja yang mendukung keterlibatan perempuan secara aktif dalam berbagai posisi, termasuk posisi kepemimpinan. Pada bagian jumlah anggota koperasi wanita menunjukkan total keseluruhan ada 5.219 orang (100% perempuan). Ini menunjukkan adanya koperasi khusus perempuan yang mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan. Data ini menunjukkan bahwa koperasi tersebut secara khusus didirikan untuk melayani dan memberdayakan perempuan. Keberadaan koperasi khusus perempuan mencerminkan upaya strategis untuk menciptakan ruang ekonomi yang inklusif bagi perempuan, terutama dalam konteks sosial di mana akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi sering kali terbatas. Koperasi semacam ini dapat menjadi sarana penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan serta memperkuat posisi mereka dalam pengambilan keputusan ekonomi dan sosial.

Koperasi perempuan juga berperan sebagai wadah solidaritas dan jaringan sosial, yang mendukung perempuan dalam mengembangkan usaha, mengakses pembiayaan, serta meningkatkan keterampilan manajerial dan kewirausahaan. Melalui koperasi, perempuan dapat membangun kapasitas kolektif untuk memperjuangkan hak-haknya dan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta komunitasnya. Kehadiran koperasi yang beranggotakan 100% perempuan menunjukkan potensi besar pemberdayaan ekonomi berbasis gender yang dapat dijadikan model untuk replikasi di wilayah atau sektor lain.

Data menunjukkan bahwa dari total pelaku usaha mikro, sebanyak 20.810 usaha (68,4%) dijalankan oleh perempuan, sementara hanya 9.611 usaha dimiliki oleh laki-laki. Dominasi perempuan dalam sektor usaha mikro ini menandakan peran sentral perempuan dalam menggerakkan ekonomi skala kecil, terutama di tingkat rumah tangga dan komunitas lokal. Ini juga mencerminkan ketangguhan perempuan dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang ada, meskipun seringkali dengan akses terbatas terhadap modal, pelatihan, dan jaringan usaha.

Tingginya keterlibatan perempuan dalam usaha mikro juga dapat dilihat sebagai strategi adaptif dalam menghadapi keterbatasan peluang kerja formal atau untuk menopang pendapatan keluarga. Fenomena ini menunjukkan potensi besar pemberdayaan ekonomi melalui penguatan usaha mikro perempuan, seperti dengan memberikan akses pembiayaan,

pelatihan kewirausahaan, dan dukungan pemasaran. Pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan perempuan, tetapi juga berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi lokal secara keseluruhan.

Data jumlah pelaku usaha mikro menunjukkan bahwa dari total pelaku usaha mikro, sebanyak 20.810 orang (68,4%) adalah perempuan, sementara laki-laki berjumlah 9.611 orang. Dominasi perempuan dalam sektor ini mencerminkan peran aktif mereka dalam menggerakkan ekonomi skala kecil, terutama sebagai strategi untuk menopang pendapatan keluarga dan menghadapi keterbatasan akses ke pekerjaan formal. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa usaha mikro menjadi ruang penting bagi pemberdayaan ekonomi perempuan, sekaligus menegaskan perlunya dukungan kebijakan dan program yang dapat memperkuat kapasitas, akses modal, dan keberlanjutan usaha yang dijalankan oleh perempuan.

Berdasarkan data jumlah pelaku UMKM binaan terdapat pelaku UMKM laki-laki 9.611 orang, dan perempuan: 20.810 orang (68,4%), ini menunjukkan bahwa perempuan mendominasi sektor usaha mikro. Hal ini mencerminkan tingginya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi skala kecil, baik sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun sebagai bentuk kemandirian ekonomi. Dominasi ini juga menunjukkan bahwa usaha mikro merupakan ruang strategis bagi pemberdayaan perempuan, sehingga penting untuk memberikan dukungan berupa akses permodalan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha guna mendorong keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi perempuan.

Kepemilikan ini memperlihatkan terjadinya pergeseran peran perempuan dari sekadar pelaku pendukung menjadi pengambil keputusan utama dalam kegiatan ekonomi, menandakan bahwa perempuan tidak hanya aktif secara ekonomi, tetapi juga memiliki kendali atas aset dan arah perkembangan usahanya, yang merupakan indikator penting dari pemberdayaan ekonomi. Dukungan berkelanjutan seperti pelatihan, akses pasar, dan permodalan menjadi kunci untuk memastikan bahwa tren positif ini terus berkembang.

Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Binaan laki-laki: 12.893 orang, Perempuan: 23.364 orang (64,4%). Lebih dari separuh tenaga kerja yang diserap oleh UMKM binaan adalah perempuan, menunjukkan kontribusi

besar perempuan dalam menciptakan dan mengisi lapangan kerja. Perempuan memegang peranan penting dalam sektor UMKM, tidak hanya sebagai pemilik usaha, tetapi juga sebagai tenaga kerja utama. Keterlibatan perempuan yang tinggi menunjukkan bahwa UMKM menjadi salah satu sektor yang inklusif terhadap tenaga kerja perempuan, baik dalam lingkup produksi, pengelolaan, maupun layanan. Tingginya partisipasi perempuan dalam lapangan kerja UMKM juga mencerminkan besarnya kontribusi mereka dalam mendukung ekonomi lokal dan keluarga. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan melalui UMKM tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan individu, tetapi juga pada perluasan kesempatan kerja secara umum. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat peran perempuan dalam UMKM melalui pelatihan keterampilan, peningkatan kualitas kerja, serta akses yang setara terhadap peluang kerja dan pengembangan usaha.

Inisiatif Lingkungan dan Sosial melalui Jumlah Bank Sampah yang telah terbentuk ada 500 unit (tidak dibedakan berdasarkan gender) akan tetapi secara umum yang mendominasi pelaku kegiatan bank sampah adalah perempuan.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa :

1. Perempuan berperan sangat aktif dalam sektor UMKM, khususnya usaha mikro dan UMKM binaan.
2. Meski partisipasi perempuan tinggi dalam usaha dan keanggotaan koperasi, terdapat kesenjangan besar dalam peran sebagai karyawan koperasi.
3. Program pemberdayaan perempuan dalam UMKM sudah cukup kuat, namun masih ada ruang untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam sektor usaha kecil, menengah, dan posisi manajerial di koperasi.
4. Anggota koperasi perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, dengan selisih sekitar 3.423 orang. Hal ini mencerminkan bahwa perempuan memiliki peran aktif dan signifikan dalam kegiatan koperasi, terutama dalam hal partisipasi sebagai anggota. Pencapaian ini juga dapat menunjukkan peningkatan kesadaran perempuan terhadap pentingnya akses terhadap lembaga keuangan dan wadah ekonomi kolektif seperti koperasi.

4.6. Perempuan dan Mekanisme Politik

Perempuan saat ini telah menunjukkan peran yang signifikan sebagai tenaga kerja di berbagai sektor kehidupan, mulai dari sektor formal seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga sektor informal seperti perdagangan, pertanian, dan usaha rumahan. Partisipasi aktif perempuan dalam dunia kerja tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencerminkan kemajuan dalam upaya kesetaraan gender. Namun demikian, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan upah, keterbatasan akses terhadap posisi strategis, serta beban ganda antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik.

Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan di tempat kerja, termasuk perlindungan hak-hak pekerja perempuan, penyediaan fasilitas ramah keluarga, serta pelatihan keterampilan yang berkelanjutan. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan setara, perempuan dapat berkontribusi lebih optimal dalam pembangunan, sekaligus memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang dalam karier dan kehidupan sosial ekonomi mereka. Keberadaan perempuan di berbagai sektor bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai pilar penting dalam kemajuan bangsa.

Data di bawah menunjukkan komposisi umum pegawai negeri sipil (PNS) yaitu : jumlah PNS laki-laki sebanyak 4.254 orang (36,9%); sedangkan PNS Perempuan (P): 7.286 (63,1%), sehingga secara keseluruhan jumlah PNS ada 11.540 orang di Kota Semarang. Dari perbandingan jumlah PNS laki-laki dan perempuan menunjukkan hasil perempuan mendominasi jumlah PNS di Kota Semarang. Dominasi ini mencerminkan keberhasilan peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor pemerintahan, yang sebelumnya cenderung didominasi oleh laki-laki. Peningkatan ini juga bisa menjadi indikator bahwa peluang kerja di sektor publik kini lebih terbuka dan inklusif bagi perempuan.

Tabel 4.26
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kota Semarang
Tahun 2024

No .	Data	2024			
		L	P	Total	Ket
1	Kepala Badan/Dinas (Eselon II)	21	8	29	1 Orang Sekretaris DPRD, 1 Orang Direktur RSUD, 19 Orang Kepala Dinas.Badan Laki Laki 8 Kepala Dinas Perempuan
2	Eselon II bukan Kepala Perangkat Daerah	3	0	3	2 Orang Laki -Laki Asisten Sekda, 1 Laki-Laki Staf Ahli Walikota
3	Camat	12	2	14	
4	Lurah	85	58	143	
5	Pengurus Partai Politik	0	0	0	
6	PNS Kantor Sekda	92	118	210	
7	PNS Badan/Dinas	3448	6611	10059	Terdiri dari 30 Badan/Dinas
8	PNS RSUD	153	442	595	Termasuk 1 Direktur RSUD
9	Walikota	-	1	-	
10	Wakil Walikota	1	-	-	
11	PNS Kecamatan	135	121	256	Termasuk 16 Camat
12	PNS Kelurahan	510	465	975	Termasuk 177 Lurah
13	Jabatan Fungsional, Struktural pada dinas pemerintahan pejabat eselon III, IV	3181	6595	9776	Eselon III sudah termasuk Camat, Eselon IV sudah termasuk Lurah, Jabatan Fungsional sudah termasuk Guru
14	PNS Fungsional Guru	645	1695	2340	
15	Kepala Sekolah	115	232	347	

Sumber : BKPP Kota Semarang, 2025

Tingginya proporsi perempuan di kalangan PNS menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang signifikan dalam pelayanan publik dan

birokrasi pemerintahan. Hal ini membuka peluang lebih besar bagi perempuan untuk menempati posisi strategis dan berkontribusi dalam proses pengambilan kebijakan. Meski demikian, dominasi jumlah belum tentu mencerminkan kesetaraan dalam jenjang karier atau posisi kepemimpinan, sehingga penting untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya hadir dalam jumlah besar, tetapi juga diberi ruang dan kesempatan yang setara dalam hal promosi jabatan dan pengembangan kompetensi.

Ditinjau lebih jauh pada bagian jabatan struktural, pada bagian Kepala Badan/Dinas (Eselon II) terdapat PNS Laki-laki: 21 orang, sedangkan PNS Perempuan ada 8 orang. Artinya persentase perempuan sebesar ~27,6%.

Meskipun perempuan mendominasi jumlah total PNS di Kota Semarang, namun pada level jabatan struktural tertinggi seperti Kepala Badan/Dinas (Eselon II), keterwakilan perempuan masih sangat rendah, yakni hanya 8 orang atau sekitar 27,6% dari total 29 pejabat. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam hal akses terhadap posisi kepemimpinan di birokrasi pemerintahan. Rendahnya proporsi perempuan di jabatan strategis ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti hambatan struktural, budaya kerja yang belum sepenuhnya inklusif, atau kurangnya dukungan pengembangan karier bagi perempuan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong kebijakan afirmatif dan program peningkatan kapasitas yang mendukung perempuan agar dapat lebih banyak mengisi posisi kepemimpinan.

Di tingkat Eselon II non Kepala Perangkat Daerah terdapat laki-laki sebanyak 3 orang dan PNS perempuan tidak ada (0). Pada bagian Lurah terdapat laki-laki: 82 orang dan perempuan sebanyak 14 orang. Sehingga bila diukur persentase perempuan ada di ~14,6% yang menandakan bahwa perempuan masih sangat minim di jabatan struktural tinggi, khususnya posisi eselon II dan lurah, menunjukkan masih adanya kesenjangan gender dalam posisi kepemimpinan.

Data menunjukkan bahwa di tingkat Eselon II non-Kepala Perangkat Daerah, seluruh posisi diisi oleh laki-laki (3 orang) tanpa keterwakilan perempuan sama sekali, dan pada jabatan lurah, dari total 96 orang, hanya 14 orang (sekitar 14,6%) yang merupakan perempuan. Fakta ini menegaskan bahwa perempuan masih sangat minim dalam mengisi jabatan struktural

tinggi di pemerintahan Kota Semarang. Ketimpangan ini mengindikasikan adanya kesenjangan gender yang nyata dalam akses terhadap posisi kepemimpinan, meskipun secara keseluruhan jumlah PNS perempuan lebih tinggi. Rendahnya representasi perempuan di posisi strategis ini menunjukkan perlunya langkah-langkah afirmatif dan kebijakan yang lebih mendorong kesetaraan gender dalam promosi jabatan dan pengembangan karier di lingkungan birokrasi.

Merujuk pada data jabatan pelaksana dan fungsional PNS Kota Semarang menunjukkan jumlah PNS Badan/Dinas berjenis kelamin laki-laki ada 3.448 orang (34,5%) dan yang berjenis kelamin perempuan ada 6.611 orang (66,5%); PNS Fungsional Guru terdapat PNS laki-laki 645 orang (27,6%) dan PNS perempuan 1.695 orang (72,4%); PNS di Sekolah (termasuk Kepala Sekolah) terdapat PNS laki-laki 1.136 orang dan PNS perempuan ada 2.072 orang; sehingga secara keseluruhan persentase perempuan sebesar ~64,6%, yang artinya PNS perempuan mendominasi jabatan fungsional dan pelaksana, terutama di bidang pendidikan, mencerminkan stereotip pekerjaan berbasis perawatan (*care work*) masih sangat melekat.

Data PNS Kota Semarang menunjukkan bahwa perempuan mendominasi jabatan pelaksana dan fungsional, khususnya di sektor pendidikan. Dari total PNS di Badan/Dinas, sebanyak 66,5% adalah perempuan, dan pada jabatan fungsional guru, persentase perempuan mencapai 72,4%. Di lingkungan sekolah, termasuk Kepala Sekolah, jumlah PNS perempuan juga lebih tinggi, yaitu 2.072 orang dibandingkan dengan laki-laki sebanyak 1.136 orang. Secara keseluruhan, perempuan menempati sekitar 64,6% dari seluruh jabatan fungsional dan pelaksana. Dominasi ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam menjalankan fungsi pelayanan publik di tingkat operasional, terutama dalam bidang pendidikan yang menjadi salah satu sektor kunci dalam pembangunan manusia.

Namun, dominasi perempuan di jabatan pelaksana dan fungsional ini juga mencerminkan masih kuatnya stereotip peran gender, di mana pekerjaan berbasis perawatan (*care work*), seperti pendidikan dan pelayanan sosial, lebih sering diidentikkan dengan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa

meskipun perempuan memiliki kontribusi besar di sektor publik, mereka cenderung terfokus pada bidang yang secara sosial dianggap sesuai dengan "kodrat" perempuan, sementara akses terhadap posisi strategis dan pengambilan keputusan masih terbatas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya mendorong keterwakilan kuantitatif perempuan dalam birokrasi, tetapi juga memperluas kesempatan mereka untuk menempati jabatan strategis lintas sektor melalui pelatihan kepemimpinan, reformasi rekrutmen, dan kebijakan afirmatif berbasis gender.

Data PNS Jabatan Fungsional Struktural lainnya menunjukkan jumlah keseluruhan sebanyak 9.686 orang dengan perbandingan PNS laki-laki sebanyak 3.110 orang (32%) dan PNS perempuan sebanyak 6.576 orang (68%). Dominasi perempuan di level operasional masih terjadi, namun tidak sebanding dengan representasi di level pengambil kebijakan.

Data PNS Jabatan Fungsional Struktural lainnya di Kota Semarang menunjukkan bahwa dari total 9.686 orang, sebanyak 6.576 orang (68%) adalah perempuan, sementara laki-laki berjumlah 3.110 orang (32%). Angka ini kembali menegaskan dominasi perempuan di level operasional dalam birokrasi pemerintahan. Namun, dominasi tersebut belum berbanding lurus dengan keterwakilan perempuan di tingkat pengambil kebijakan atau jabatan struktural tinggi, yang justru masih didominasi oleh laki-laki. Ketimpangan ini mencerminkan adanya hambatan struktural dan budaya yang membatasi mobilitas perempuan dalam jenjang karier birokrasi, sehingga perlu upaya nyata untuk mendorong kesetaraan gender, tidak hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam akses terhadap posisi strategis dan pengaruh dalam pengambilan keputusan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa :

1. Perempuan secara kuantitatif mendominasi sebagai PNS di Kota Semarang, terutama pada posisi pelaksana dan fungsional seperti guru.
2. Namun, dalam posisi strategis dan pengambil keputusan, perempuan masih jauh tertinggal, contohnya pada jabatan kepala dinas, lurah, dan pejabat eselon II.
3. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan gender secara vertikal, yaitu banyaknya perempuan di level bawah namun sedikit di level atas.

Distribusi Gender Tenaga Kesehatan Kota Semarang (2024)

Berikut tabel jumlah tenaga kesehatan di Kota Semarang

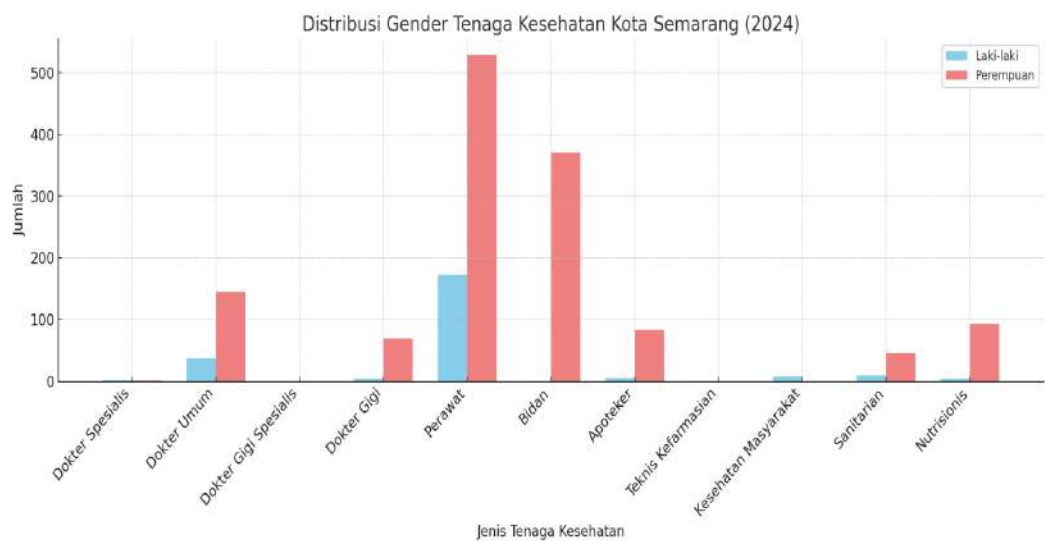
Tabel 4.27
Jumlah Tenaga Kesehatan

No	Tenaga Kesehatan	2023			2024		
		L	P	Jml	L	P	Jml
1	Dokter Spesialis	3	3	6	2	3	5
2	Dokter Umum	26	110	136	38	145	183
3	Dokter Gigi Spesialis						
4	Dokter Gigi	2	28	30	4	69	73
5	Perawat	72	290	362	173	529	702
6	Bidan		176	176		371	371
7	Apoteker	2	25	27	5	83	88
8	Teknis kefarmasian						
9	Kesehatan masyarakat						
10	Sanitarian	4	25	29	9	45	54
11	Nutrisionis	3	41	44	4	93	97

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025

Bila dilihat secara grafik akan tampak pada grafik dibawah ini.

Grafik 4.6
Jumlah Tenaga Kesehatan Kota Semarang
Tahun 2024



Grafik ini menunjukkan distribusi jumlah tenaga kesehatan laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis profesi di Kota Semarang pada tahun 2024.

Perempuan mendominasi sebagian besar profesi, terutama perawat, bidan, dan dokter umum.

Komposisi Umum Tenaga Kesehatan 2024 menunjukkan total: 1.568 tenaga kesehatan yang terdiri dari laki-laki (L) sebanyak 323 orang (20,6%) dan Perempuan (P) sebanyak 1.245 orang (79,4%). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mendominasi jumlah tenaga kesehatan, dengan hampir 4 dari 5 tenaga kesehatan adalah perempuan. Dominasi perempuan dalam sektor kesehatan ini mencerminkan bahwa profesi di bidang layanan publik yang berkaitan dengan perawatan dan kesehatan masih sangat identik dengan peran gender perempuan. Hampir 4 dari 5 tenaga kesehatan adalah perempuan, yang menunjukkan tingginya partisipasi mereka dalam pekerjaan berbasis perawatan (care work). Meskipun mencerminkan kontribusi besar perempuan terhadap sektor kesehatan, data ini juga mengindikasikan adanya kecenderungan pelabelan sosial yang membatasi peran perempuan pada jenis pekerjaan tertentu, sehingga penting untuk membuka ruang yang lebih setara bagi perempuan dan laki-laki di seluruh jenis profesi, termasuk dalam jenjang karier dan posisi kepemimpinan di bidang kesehatan.

PNS Profesi Perawat menunjukkan jumlah laki-laki sebesar 173 orang (24,6%) sedangkan perempuan sebanyak 529 orang (75,4%), sehingga total keseluruhan jumlah PNS perawat 702 orang. PNS yang berprofesi sebagai Bidan Perempuan 371 orang (100%) sedangkan Bidan laki-laki tidak ada (0%). PNS Nutrisionis ada 4 orang laki-laki dan 93 orang perempuan sehingga total keseluruhan PNS Nutrisionis ada 97 orang.

Gambaran penjelasan diatas menunjukkan bahwa profesi yang berkaitan langsung dengan perawatan dan kesehatan perempuan (seperti bidan, perawat, dan nutrisionis) didominasi mutlak oleh perempuan. Profesi ini juga cenderung dianggap sebagai "pekerjaan feminim" karena berbasis empati dan pelayanan.

Gambaran ini menunjukkan bahwa profesi seperti bidan, perawat, dan nutrisionis masih sangat melekat pada peran tradisional perempuan, yang identik dengan empati, pelayanan, dan perawatan. Hal ini mencerminkan kuatnya stereotip gender dalam dunia kerja, di mana profesi berbasis "care work" dianggap sebagai pekerjaan feminim, sehingga partisipasi laki-laki dalam profesi ini masih sangat rendah. Untuk menciptakan kesetaraan

gender yang lebih adil, penting untuk mendorong perubahan pandangan masyarakat dan membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif bagi semua gender di berbagai jenis profesi.

Profesi Medis dan Teknis Mulai Lebih Inklusif: Jumlah PNS Dokter Umum terdapat dokter laki-laki ada 38 orang sedangkan dokter perempuan ada 145 orang sehingga total dokter yang berstatus PNS ada 183 orang. Dari hasil tersebut diperoleh persentase dokter perempuan: 79,2%. PNS Dokter Gigi menunjukkan jumlah dokter gigi laki-laki sebanyak 4 orang sedangkan dokter gigi perempuan ada 69 orang, artinya sebanyak 94,5% didominasi oleh dokter perempuan.

PNS Dokter Spesialis menunjukkan jumlah dokter spesialis laki-laki sebanyak 3 orang dan dokter spesialis perempuan sebanyak 2 orang dengan total 5 orang dokter spesialis. Ini kondisi ini menunjukkan lebih seimbang daripada posisi lainnya, tapi masih minim secara jumlah.

Secara keseluruhan, pada profesi medis seperti dokter, perempuan tetap mendominasi, yang menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan kedokteran semakin terbuka dan inklusif bagi perempuan. Dominasi ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam upaya kesetaraan gender di bidang pendidikan tinggi dan profesi kesehatan, yang sebelumnya cenderung didominasi oleh laki-laki. Perempuan tidak hanya memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakses pendidikan kedokteran, tetapi juga menunjukkan kemampuan dan kepercayaan diri untuk menempati posisi profesional di sektor medis. Hal ini menjadi indikator positif bahwa hambatan struktural dan sosial terhadap perempuan dalam bidang profesi bergengsi seperti kedokteran mulai berkurang, meskipun tantangan dalam hal kepemimpinan dan jenjang karier tetap perlu menjadi perhatian.

Pada bagian kesehatan masyarakat dan bidang teknis terdapat gambaran sebagai berikut : jumlah tenaga Kesehatan Masyarakat laki-laki ada 8 orang sedangkan perempuan tidak ada (0). tenaga sanitarian laki-laki ada 9 orang sedangkan perempuan ada 45 orang. Beberapa bidang seperti kesehatan masyarakat dan sanitarian mulai memperlihatkan keberagaman gender, meskipun data masih terbatas atau belum lengkap. Data tersebut mencerminkan adanya pergeseran peran gender yang lebih beragam, khususnya dalam profesi teknis kesehatan. Meskipun belum merata,

keberagaman gender ini menunjukkan bahwa beberapa bidang kesehatan mulai terbuka bagi partisipasi lintas gender, meskipun masih terlihat ketimpangan pada bidang tertentu seperti kesehatan masyarakat yang sepenuhnya diisi laki-laki. Di sisi lain, data untuk profesi Ahli Teknologi Laboratorium Medik masih kosong, sehingga belum dapat dianalisis secara menyeluruh. Namun, kecenderungan ini menunjukkan bahwa perluasan peran dan akses kerja di sektor kesehatan perlu terus didorong agar lebih inklusif, dengan disertai pendataan yang lengkap untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis kesetaraan gender.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa :

1. Perempuan secara signifikan mendominasi jumlah tenaga kesehatan, terutama dalam profesi berbasis pelayanan seperti bidan, perawat, dan dokter umum.
2. Laki-laki masih minim di sektor pelayanan langsung, namun mulai terlihat dalam peran teknis dan kesehatan masyarakat.
3. Perlu dorongan kebijakan afirmatif agar perempuan juga berdaya di profesi teknis, manajerial, atau spesialis yang masih didominasi laki-laki.

Berikut adalah analisis gender berdasarkan tabel "Jumlah Guru dan Kepala Sekolah di Kota Semarang Tahun Ajaran 2024/2025":

Tabel 4.28
Jumlah Guru dan Kepala Sekolah di Kota Semarang
Tahun Ajaran 2024/2025

No	Guru	2024/2025		
		L	P	Jml
1	PNS Fungsional Guru	645	1695	2340
2	PNS Kepala Sekolah	115	232	347
3	PPPK Guru	1111	2107	3218

bbSumber, BKPP Kota Semarang, 2024

Data diatas menunjukkan PNS fungsional guru tahun ajaran 2024/2025: guru laki-laki ada 645 orang; dan guru perempuan: 1.695 orang. Artinya persentase perempuan tetap tinggi (72%), menunjukkan dominasi guru perempuan masih bertahan. Profesi guru masih sangat feminim, menunjukkan stereotip pekerjaan yang dianggap cocok untuk perempuan.

Dominasi perempuan dalam profesi guru masih sangat kuat. Tingginya persentase ini menegaskan bahwa profesi guru tetap dianggap sebagai pekerjaan yang “feminin” dan cocok bagi perempuan, karena berkaitan erat dengan peran merawat, mendidik, dan membimbing—peran yang secara kultural sering dilekatkan pada perempuan. Meskipun mencerminkan partisipasi aktif perempuan dalam dunia pendidikan, dominasi ini juga mencerminkan stereotip gender yang masih kuat, yang dapat membatasi persepsi tentang profesi ini sebagai jalur karier bagi laki-laki. Oleh karena itu, penting untuk membangun narasi yang lebih inklusif tentang profesi guru sebagai bidang yang terbuka dan setara bagi semua gender

PNS Kepala Sekolah tahun ajaran 2024/2025 menunjukkan kepala sekolah laki-laki ada 115 orang, dan kepala sekolah perempuan ada 232. Artinya perempuan masih dominan (66,9%), meskipun jumlah laki-laki naik signifikan. Meskipun demikian, peningkatan signifikan jumlah laki-laki menunjukkan adanya pergeseran dan keterbukaan yang lebih besar terhadap keterlibatan laki-laki dalam bidang yang sebelumnya didominasi perempuan. Hal ini bisa menjadi indikasi awal dari perubahan persepsi terhadap peran gender dalam dunia kerja, khususnya di sektor-sektor yang selama ini dianggap “feminin.” Tren ini perlu terus didorong agar tercipta kesetaraan dan keberagaman gender dalam berbagai jenis profesi.

Pada tahun 2024/2025, dalam skema PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), tercatat jumlah guru perempuan sebanyak 2.107 orang (65,5%) dan laki-laki sebanyak 1.111 orang, menunjukkan bahwa profesi guru dalam skema ini juga tetap didominasi oleh perempuan. Ketimpangan gender ini konsisten dengan pola yang terlihat pada status kepegawaian lainnya, di mana guru perempuan secara signifikan lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini kembali menguatkan bahwa profesi guru masih sangat lekat dengan stereotip sebagai pekerjaan yang cocok untuk perempuan, terutama karena sifatnya yang berbasis pengasuhan dan pendidikan. Meskipun skema PPPK membuka peluang lebih luas bagi rekrutmen, representasi gender yang seimbang masih menjadi tantangan, dan perlu ada langkah strategis untuk mendorong partisipasi laki-laki dalam profesi pendidikan demi menciptakan keberagaman dan keseimbangan dalam dunia pengajaran. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Profesi guru di Kota Semarang sangat feminim, baik dalam skema PNS maupun PPPK.
2. Perempuan mendominasi profesi guru dan kepala sekolah, tetapi peningkatan signifikan jumlah kepala sekolah laki-laki perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi bias dalam promosi jabatan.
3. Kesetaraan gender di sektor pendidikan cukup baik dalam hal keterwakilan perempuan, tetapi perlu dikaji lebih lanjut terkait kesetaraan dalam akses promosi dan pengambilan keputusan.

Jika data tersebut digambarkan dalam grafik akan tampak seperti grafik di bawah ini.

Grafik 4.7
Jumlah Guru dan Kepala Sekolah di Kota Semarang Berdasarkan Gender



4.7. Perempuan, Politik dan Hukum

Perempuan memiliki peran strategis dalam bidang politik dan hukum, baik sebagai pembuat kebijakan, pelaksana hukum, maupun sebagai penggerak perubahan sosial. Keterlibatan perempuan dalam politik, seperti menjadi anggota legislatif, kepala daerah, hingga menteri, menunjukkan kemajuan partisipasi gender dalam ruang publik yang selama ini didominasi laki-laki. Begitu pula di bidang hukum, semakin banyak perempuan yang berkiprah sebagai hakim, jaksa, advokat, maupun akademisi hukum, yang membuktikan bahwa kapasitas dan intelektualitas perempuan sejajar dengan laki-laki dalam menegakkan keadilan dan merumuskan arah kebijakan negara. Keberadaan perempuan dalam dua bidang strategis ini sangat penting untuk memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan perempuan terakomodasi dalam sistem hukum dan politik.

Namun demikian, tantangan masih dihadapi oleh perempuan yang ingin berkarier di bidang ini, seperti stereotip gender, minimnya dukungan struktural, serta representasi yang belum proporsional. Oleh karena itu, perlu adanya afirmasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan keterwakilan perempuan, baik melalui kuota politik, pelatihan kepemimpinan, maupun penciptaan lingkungan kerja yang inklusif dan bebas dari diskriminasi. Dengan memperkuat peran perempuan di bidang politik dan hukum, bangsa Indonesia dapat membangun sistem yang lebih adil, demokratis, dan responsif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Berikut digambarkan situasi perempuan di Kota Semarang terkait dengan keterlibatannya dalam politik dan hukum

Tabel 4.29
Perempuan di Bidang Politik dan Hukum
Tahun 2024

No	Pegawai	L	P	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Anggota DPRD	37	13	50	org
2	Jumlah Pimpinan DPRD	3	1	4	org
3	Jumlah Hakim di Pengadilan Negeri	47	16	63	org
4	Jumlah Pejabat Struktural di Pengadilan Negeri	8	4	12	org
5	Jumlah Pegawai di Pengadilan Negeri	23	39	62	org
6	Jumlah Hakim di Pengadilan Agama	9	2	11	org
7	Jumlah Jaksa di Kejaksaan Negeri	22	26		org
8	Jumlah pegawai di Kantor Kejaksaan Negeri	34	42		org
9	Jumlah Kepala Polres	1	-	-	org
10	Jumlah Polisi Kepala Sektor (Kapolsek)	16	1	17	org
11	Jumlah Polisi di Wilayah Polres	1.832	144	1.976	org
12	Jumlah Pejabat Polisi di Wilayah Polres	36	4	40	org

Sumber: DPRD, Bawaslu, KPU, BKD, OPD terkait

Terkait dengan komposisi pimpinan dan anggota DPRD :

- a) Total Anggota DPRD ada 50 orang. Dengan perbandingan anggota laki-laki ada 37 orang (74%) dan anggota perempuan ada 13 orang (26%). Keterwakilan perempuan di anggota DPRD sebesar 26%, artinya 1 dari 4 anggota DPRD adalah perempuan. Ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan sudah mulai masuk ke ranah politik, keterwakilannya masih cukup rendah dibanding laki-laki.

- b) Total Pimpinan DPRD ada 4 orang. Dengan perbandingan pimpinan laki-laki ada 3 orang (75%) dan pimpinan perempuan ada 1 orang (25%). Hanya 25% pimpinan DPRD adalah perempuan. Angka ini sejalan dengan proporsi di tingkat anggota, menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di posisi pengambilan keputusan juga masih terbatas.

Dari keadaan tersebut, perempuan masih menjadi minoritas dalam dunia politik lokal, baik sebagai anggota maupun pimpinan DPRD. Perlu upaya penguatan peran perempuan dalam politik dan hukum, misalnya melalui afirmasi atau pelatihan kepemimpinan politik bagi perempuan. Rasio keterwakilan perempuan belum mencapai target 30% keterwakilan perempuan sebagaimana sering digaungkan dalam kebijakan afirmatif gender di Indonesia.

Jumlah hakim laki-laki di Pengadilan Negeri Semarang ada 47 orang dan hakim perempuan ada 16 orang sehingga total keseluruhan hakim yang ada di Kota Semarang ada 63 orang. Dari gambaran tersebut terlihat profesi hakim di Pengadilan Negeri masih didominasi laki-laki, dengan proporsi sekitar 74,6% laki-laki dan 25,4% perempuan, menunjukkan adanya ketimpangan gender yang cukup besar.

Jumlah Pejabat Struktural laki-laki di Pengadilan Negeri Semarang ada 8 orang dan perempuan ada 4 orang sehingga jumlah pejabat struktural ada 12 orang. Meski tetap didominasi laki-laki, ketimpangan gender pada jabatan struktural tidak terlalu besar, dengan 66,7% laki-laki dan 33,3% perempuan. Ini menunjukkan peluang perempuan untuk menduduki posisi struktural mulai terbuka, meskipun masih terbatas.

Jumlah pegawai laki-laki di Pengadilan Negeri Semarang ada 23 orang; dan pegawai perempuan ada 39 orang sehingga keseluruhan pegawai di Pengadilan Negeri Semarang ada 62 orang. Berbeda dari dua kategori sebelumnya, jumlah pegawai justru didominasi perempuan (62,9%), sedangkan laki-laki hanya 37,1%. Ini menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak menempati posisi sebagai staf pelaksana dibanding struktural atau fungsional (hakim).

Jumlah hakim laki-laki di Pengadilan Agama Semarang ada 9 orang dan perempuan ada 2 orang, jadi jumlah hakim di Pengadilan Agama Semarang ada 11 orang. Sama seperti di Pengadilan Negeri, hakim di

Pengadilan Agama juga masih sangat didominasi laki-laki (81,8%), dengan hanya 18,2% perempuan. Ketimpangan ini mencerminkan tantangan dalam pencapaian kesetaraan gender di posisi fungsional penting.

Secara keseluruhan, berdasarkan data yang tersedia, terlihat bahwa posisi strategis dan fungsional seperti hakim dan pejabat struktural di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama masih didominasi oleh laki-laki. Persentase hakim laki-laki di Pengadilan Negeri mencapai 74,6% dan di Pengadilan Agama bahkan mencapai 81,8%. Begitu pula pada jabatan struktural di Pengadilan Negeri, laki-laki mengisi dua pertiga dari total posisi yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih memiliki keterbatasan akses terhadap jabatan-jabatan penting dan pengambilan keputusan di lingkungan peradilan.

Sebaliknya, jumlah perempuan lebih banyak terlihat pada kategori pegawai/staf pelaksana, dengan dominasi sebesar 62,9%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun keterwakilan perempuan cukup tinggi dalam struktur organisasi, sebagian besar berada pada posisi non-strategis. Ketimpangan ini mencerminkan tantangan dalam mendorong kesetaraan gender secara menyeluruh, khususnya dalam hal pengembangan karier dan peningkatan partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan di lembaga peradilan.

Jumlah jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang adalah sebagai berikut : Jaksa laki-laki ada 22 orang dan Jaksa perempuan ada 26 orang, sehingga secara keseluruhan jumlah jaksa ada 48 orang. Keadaan tersebut memperlihatkan terdapat lebih banyak jaksa perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa profesi jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang tidak lagi didominasi laki-laki, dan perempuan memiliki peran yang kuat dalam sektor hukum.

Terkait dengan jumlah pegawai yang ada di Kantor Kejaksaan Negeri (non-jaksa), pegawai laki-laki berjumlah 34 orang dan pegawai perempuan berjumlah 42 orang, sehingga total pegawai ada 76 orang. Gambaran tersebut menunjukkan komposisi pegawai di kantor Kejaksaan Negeri juga menunjukkan dominan perempuan (sekitar 55%). Ini mencerminkan adanya peningkatan keterlibatan perempuan dalam peran administratif dan pendukung di lembaga hukum.

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan mendominasi baik di posisi jaksa maupun pegawai kantor, yang menunjukkan kemajuan dalam kesetaraan gender di sektor hukum. Tidak ada kesenjangan signifikan antara jumlah laki-laki dan perempuan, yang menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri telah memberikan kesempatan setara dalam perekrutan dan penempatan pegawai. Capaian ini penting untuk terus dijaga dan diperluas agar perempuan tidak hanya hadir secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

Kepala Polres adalah seorang laki-laki yang mencerminkan bahwa laki-laki lebih dipercaya memimpin di lingkungan kepolisian dari pada polisi perempuan. Polisi Kepala Sektor (Kapolsek) laki-laki ada 16 orang; Kapolsek perempuan ada 1 orang. Dari total 17 Kapolsek, hanya 5,9% yang perempuan, menunjukkan bahwa posisi kepemimpinan tingkat menengah pun masih didominasi oleh laki-laki (94,1%).

Jumlah polisi laki-laki di wilayah polres ada 1.832 orang dan polisi perempuan: 144 orang dengan total keseluruhan anggota polisi di Kota Semarang ada 1.976 orang. Komposisi polisi secara keseluruhan di wilayah Polres menunjukkan dominasi laki-laki sebesar 92,7%, sedangkan perempuan hanya 7,3%. Ini mencerminkan ketimpangan besar dalam keterwakilan gender di tubuh kepolisian.

Untuk komposisi jumlah pejabat polisi di Wilayah Polres, terdapat 36 orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan ada 4 orang. Dari total 40 pejabat polisi, perempuan hanya mengisi 10% posisi, sedangkan laki-laki mengisi 90%. Ini menunjukkan bahwa peluang perempuan untuk menduduki jabatan struktural juga masih sangat terbatas.

Secara keseluruhan gambaran mengenai personel kepolisian di wilayah Polres masih didominasi secara kuat oleh laki-laki, baik dalam jumlah keseluruhan maupun pada jabatan strategis seperti Kapolres dan Kapolsek. Keterwakilan perempuan masih sangat rendah, terutama di posisi kepemimpinan dan struktural, yang mengindikasikan tantangan besar dalam menciptakan kesetaraan gender di institusi kepolisian. Upaya afirmatif dan kebijakan berbasis gender perlu diperkuat untuk membuka lebih banyak ruang partisipasi perempuan di sektor ini.

4.8. Perempuan, Anak dan Kekerasan

Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan yang diberikan termasuk perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, upaya eksploitasi ekonomi, situasi darurat, perdagangan manusia, hingga kemiskinan.

Berikut tersaji data PMKS tahun 2024.

Tabel 4.30

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

N O	URAIAN	LAKI- LAKI	PEREM PUAN	JUMLA H	SATUA N
1	Jumlah panti asuhan			100	unit
	Jumlah anak panti asuhan	2.050	2.074	4.124	anak
2	Anak jalanan	2		2	kasus
3	Anak berhadapan dengan hukum	1	-	0	kasus
4	Anak dengan keterbatasan atau disabilitas	337	257	594	anak
5	Anak dalam situasi rentan	1.348	1.246	2.594	anak

Sumber : Dinas Sosial, 2025

Jumlah anak panti asuhan laki-laki ada 2.050 anak; dan anak perempuan ada 2.074 anak, sehingga secara keseluruhan jumlah anak yang tinggal di panti asuhan ada 4.124 anak. Perbedaan jumlah sangat kecil; komposisi anak laki-laki dan perempuan hampir seimbang (masing-masing sekitar 50%). Artinya, baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki peluang serupa menjadi penerima layanan panti asuhan.

Jumlah anak jalanan yang ditangani oleh Dinas Sosial ada anak laki-laki 2 anak dan anak perempuan: 0 orang. Semua kasus anak jalanan tercatat sebagai laki-laki. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa anak laki-laki lebih terekspos atau lebih teridentifikasi dalam aktivitas jalanan, sementara kasus anak perempuan mungkin tidak terdata atau mengalami eksploitasi dalam bentuk yang berbeda dan lebih tersembunyi.

Jumlah anak laki-laki yang berhadapan dengan hukum tahun 2024 ada 1 anak dan tidak ada anak perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, artinya sama seperti anak jalanan, kasus anak berhadapan dengan hukum hanya melibatkan laki-laki. Hal ini mencerminkan bahwa anak laki-laki lebih rentan terhadap pelanggaran hukum atau terlibat dalam tindakan kriminal dibanding perempuan.

Anak laki-laki dengan disabilitas ada 337 anak sedangkan anak perempuan dengan disabilitas ada 257 anak. Laki-laki mendominasi kategori ini (56,7%), meskipun tidak terlalu signifikan. Ini bisa menunjukkan bahwa anak laki-laki lebih banyak terdeteksi atau dilaporkan mengalami disabilitas, atau bisa juga berkaitan dengan jenis disabilitas yang lebih tampak pada laki-laki.

Anak laki-laki dalam situasi rentan ada 1.348 anak; sedangkan anak perempuan ada 1.246 anak. Hal ini menunjukkan bahwa pada situasi rentan ini jumlahnya hampir seimbang, dengan sedikit dominasi laki-laki (52%). Kategori ini menunjukkan bahwa kedua gender sama-sama berisiko mengalami kerentanan sosial, meskipun distribusinya relatif proporsional.

Rangkuman data diatas, secara keseluruhan menunjukkan bahwa anak laki-laki sedikit lebih banyak teridentifikasi dalam kelompok rentan sosial, terutama dalam kategori anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak dengan disabilitas. Sementara itu, jumlah anak perempuan di panti asuhan dan dalam situasi rentan juga cukup tinggi dan seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan sama-sama menghadapi risiko kesejahteraan sosial, meskipun bentuk kerentanannya bisa berbeda. Oleh karena itu, perlu pendekatan sensitif gender dalam merancang intervensi sosial agar perlindungan anak dapat lebih tepat sasaran dan adil.

Analisis Gender terhadap Korban Kekerasan

Berdasarkan data nasional dan studi dari lembaga seperti KPAI dan Komnas Perempuan, perempuan dan anak perempuan cenderung lebih

rentan terhadap kekerasan seksual, sementara anak laki-laki lebih rentan terhadap kekerasan fisik dan penelantaran.

Data di bawah ini menyoroti pentingnya perlindungan perempuan dan anak dengan pendekatan berbasis gender. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama mengurangi kekerasan dengan memahami kerentanan spesifik anak laki-laki dan perempuan, serta memastikan setiap kasus ditangani secara adil dan sensitif terhadap perbedaan kebutuhan korban.

Tabel 4.31
Kasus Kekerasan pada Anak per Kecamatan
Tahun 2024

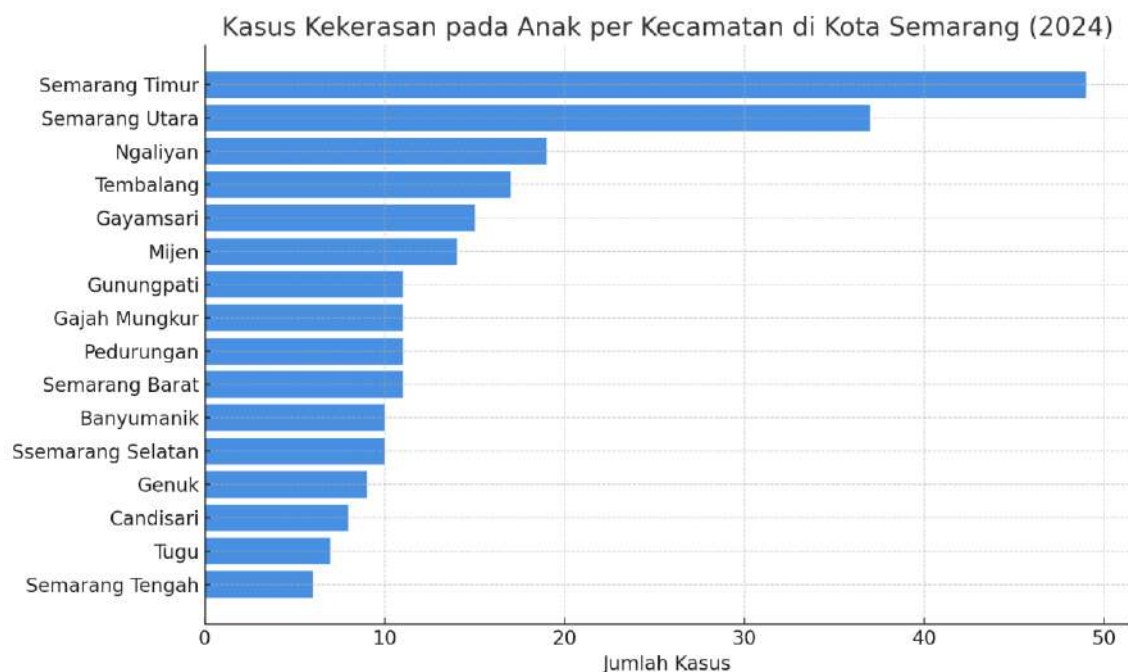
Kecamatan	Jumlah Kasus
Mijen	14
Gunungpati	11
Banyumanik	10
Gajah Mungkur	11
Ssemarang Selatan	10
Candisari	8
Tembalang	17
Pedurungan	31
Genuk	9
Gayamsari	15
Semarang Timur	49
Semarang Utara	37
Semarang Tengah	6
Semarang Barat	11
Tugu	7
Ngaliyan	19

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2025

Sebaran kasus kekerasan anak yang tampak pada data diatas menunjukkan bahwa kecamatan dengan angka tertinggi: Semarang Timur: 49 kasus; Semarang Utara: 37 kasus; Tembalang: 17 kasus; Ngaliyan: 19 kasus. Sementara angka terendah tercatat di: Candisari: 8 kasus; Banyumanik: 10

kasus; Semarang Barat dan Gunungpati: masing-masing 11 kasus. Wilayah dengan jumlah kasus tinggi seperti Semarang Timur dan Semarang Utara kemungkinan besar memiliki beban sosial-ekonomi atau kepadatan penduduk yang tinggi, yang bisa memperbesar risiko kekerasan terhadap anak — baik laki-laki maupun perempuan.

Grafik 4.8
Kasus Kekerasan pada Anak per Kecamatan di Kota Semarang
Tahun 2024



Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin

Kekerasan terhadap perempuan lebih banyak dibandingkan kekerasan terhadap laki-laki. Kekerasan berbasis gender dapat berupa kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan rendahnya kesadaran hukum, budaya patriarki, Ekonomi yang rendah/kemiskinan, Dugaan adanya perselingkuhan, Pernikahan dini.

Tabel 4.32
Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan
Tahun 2024

Kategori	Anak Laki-laki	Perempuan	Total
Mijen	1	13	14
Gunungpati	3	8	11
Banyumanik	0	10	10
Gajah Mungkur	0	11	11
Semarang Selatan	1	9	10
Candisari	0	8	8
Tembalang	7	12	19
Pedurungan	5	26	31
Genuk	0	9	9
Gayamsari	0	15	15
Semarang Timur	5	45	50
Semarang Utara	3	36	39
Semarang Tengah	0	6	6
Semarang Barat	0	12	12
Tugu	1	6	7
Ngaliyan	2	19	21

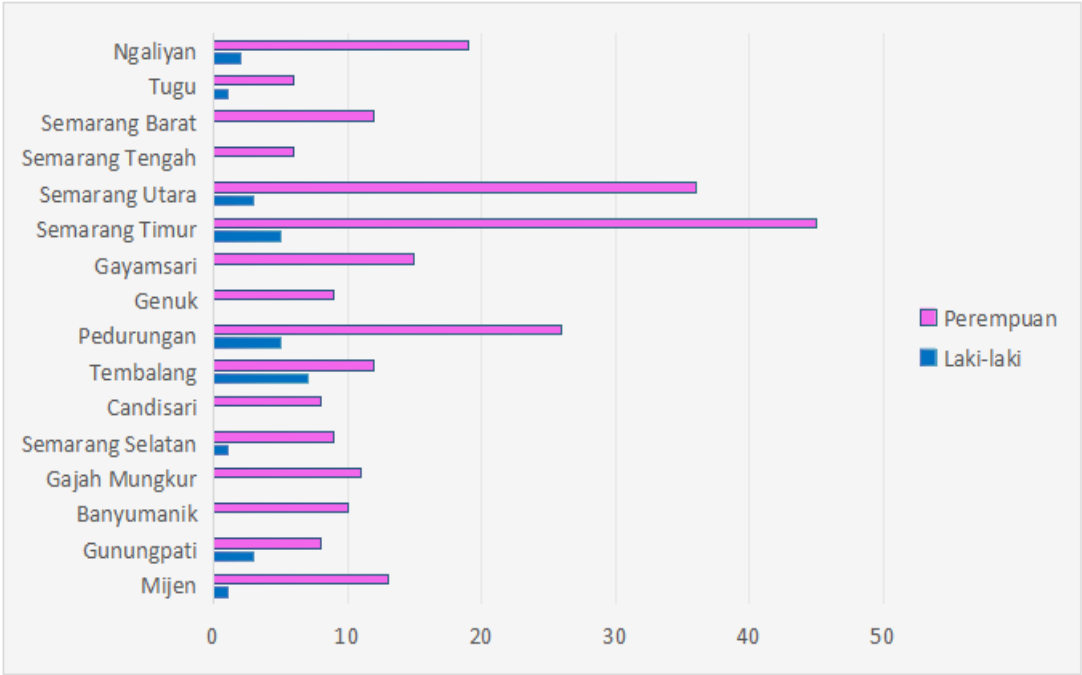
Sumber : DP3A Kota Semarang, 2025

Dari total korban yang tercatat di seluruh kecamatan, korban perempuan jauh lebih banyak dibandingkan anak laki-laki. Contoh: Semarang Timur korban anak laki-laki ada 5 orang, perempuan ada 45 orang Kecamatan Pedurungan anak laki-laki ada 5 orang sedangkan perempuan ada 26 orang. Sedangkan Semarang Utara korban anak laki-laki ada 3 orang dan korban perempuan ada 34 orang.

Data diatas menunjukkan bahwa mayoritas korban kekerasan adalah perempuan, yang menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan menjadi korban, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Ini konsisten dengan data nasional yang menunjukkan perempuan, bahkan sejak usia anak-anak, lebih sering menjadi korban kekerasan berbasis gender.

Beberapa kecamatan bahkan mencatat tidak ada korban laki-laki sama sekali, seperti: Banyumanik; Semarang Tengah; Semarang Barat. Sementara korban perempuan ada di setiap kecamatan tanpa terkecuali. Ini mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap anak masih sangat dipengaruhi oleh relasi kuasa berbasis gender, di mana perempuan sering kali menjadi pihak yang lebih rentan.

Grafik 4.9
Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan
Tahun 2024



Tabel 4.33
Kasus Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian
Tahun 2024

Kategori	Jumlah Kasus
Rumah Tangga	171
Tempat Kerja	9
Sekolah	9
Fasilitas Umum	33
Lainnya	44

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2025

Berdasarkan tabel "Kasus Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian Tahun 2024" dari DP3A Kota Semarang, terlihat bahwa kasus kekerasan paling banyak terjadi di lingkungan rumah tangga, yakni sebanyak 171 kasus, jauh lebih tinggi dibandingkan tempat lain seperti fasilitas umum (33 kasus), tempat kerja (9 kasus), sekolah (9 kasus), dan lainnya (44 kasus).

Data ini mengindikasikan bahwa rumah tangga masih menjadi tempat yang paling rentan terhadap kekerasan, dan dalam konteks gender, korban paling dominan adalah perempuan. Ini selaras dengan berbagai laporan nasional maupun internasional yang menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) umumnya dialami oleh perempuan, baik sebagai istri, ibu, maupun anak perempuan.

Faktor-faktor seperti relasi kuasa yang timpang, budaya patriarki, serta ketergantungan ekonomi sering kali membuat perempuan berada dalam posisi yang lebih rentan untuk menjadi korban, namun sulit untuk melapor atau keluar dari situasi kekerasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah tangga belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi perempuan, dan membutuhkan intervensi serius dalam bentuk perlindungan hukum, edukasi gender, serta penguatan layanan dukungan korban.

Tabel 4.34
Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Layanan
Yang Diberikan di Tahun 2024

Kategori	Jumlah Kasus
Pengaduan	128
Layanan Kesehatan	79
Layanan Bantuan Hukum	82
Penegakan Hukum	46
Rehabilitasi Sosial	8
Reintegrasi Sosial	3
Pemulangan	4
Pendampingan	162
Konseling	158

Koordinasi	104
Visum	54
Bimbingan Rohani	8
Mediasi	54
Tokoh Masyarakat	53

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2025

Berdasarkan layanan yang diberikan untuk korban kekerasan terbanyak adalah layanan pendampingan korban sebanyak 162 layanan, konseling dengan 158 layanan dan pengaduan sebanyak 128. Layanan yang sedikit dilakukan adalah layanan reintegrasi sosial yaitu upaya membangun kembali kepercayaan sosial setelah terjadinya diintegrasisocial, sebanyak 3 layanan dan pemulangan korban sebanyak 4 layanan.

Kekerasan terhadap individu, khususnya terhadap perempuan, masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian bersama. Beragam bentuk kekerasan terus terjadi di berbagai lingkungan, mulai dari kekerasan fisik, psikis, hingga kekerasan seksual, yang berdampak besar terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial korban. Data mengenai tindak kekerasan yang dialami korban menjadi penting sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan perlindungan yang lebih tepat sasaran dan responsif gender. Berikut tersaji data kasus kekerasan berdasarkan tindak kekerasan yang dialami korban.

Tabel 4.35
Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Tindak Kekerasan
Yang Dialami Korban Tahun 2024

Kategori	Jumlah Kasus
Fisik	120
Psikis	73
Seksual	84
Penelantaran	40
Eksplotasi Ekonomi	5
Kekerasan Lainnya	13
Trafficking	0

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

Berdasarkan data Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Tindak Kekerasan yang Dialami Korban Tahun 2024 dari DP3A Kota Semarang, terlihat bahwa bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah: kekerasan fisik (120 kasus); kekerasan seksual (84 kasus); kekerasan psikis (73 kasus); penelantaran (40 kasus). Sementara itu, eksploitasi ekonomi (5 kasus) dan trafficking tercatat 0 kasus.

Data ini menunjukkan bahwa perempuan sangat rentan mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk, khususnya fisik, seksual, dan psikis, yang merupakan tiga jenis kekerasan paling dominan. Umumnya, perempuan menjadi korban utama kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga karena posisi sosial yang tidak setara, norma budaya patriarkis, dan ketergantungan ekonomi terhadap pasangan atau keluarga.

Kekerasan seksual mencerminkan ketimpangan kekuasaan dan kontrol atas tubuh perempuan, sering kali terjadi dalam relasi yang dekat seperti pasangan atau anggota keluarga. Kekerasan psikis dan fisik juga sering dialami perempuan karena mereka dianggap lebih lemah atau tidak berdaya untuk melawan. Sementara itu, penelantaran dan eksploitasi ekonomi mengindikasikan masih kurangnya perlindungan terhadap peran domestik dan kerja-kerja tak berbayar yang banyak dilakukan oleh perempuan.

Tabel 4.36
Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan
Tahun 2024

Kategori	Anak Laki-laki	Perempuan	Total
Mijen	1	13	14
Gunungpati	3	8	11
Banyumanik	0	10	10
Gajah Mungkur	0	11	11
Semarang Selatan	1	9	10
Candisari	0	8	8
Tembalang	7	12	19
Pedurungan	5	26	31
Genuk	0	9	9
Gayamsari	0	15	15
Semarang Timur	5	45	50
Semarang Utara	3	36	39
Semarang Tengah	0	6	6
Semarang Barat	0	12	12
Tugu	1	6	7
Ngaliyan	2	19	21

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

Kekerasan terhadap perempuan lebih banyak dibandingkan kekerasan terhadap laki-laki. Kekerasan berbasis gender dapat berupa kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan rendahnya kesadaran hukum, budaya patriarki, Ekonomi yang rendah/kemiskinan, Dugaan adanya perselingkuhan, Pernikahan dini.

Tabel diatas menunjukkan jumlah kekerasan terbanyak ada di wilayah Semarang Timur yaitu 50 kasus; Kecamatan Semarang Utara 39 kasus dan Kecamatan Pedurungan. Sedangkan kasus yang terkecil ada di wilayah Semarang Tengah dengan jumlah 6 kasus. Sepanjang warga masyarakat belum paham dasar penyebab kekerasan maka kekerasan terus berlanjut.

Tabel selanjutnya memperlihatkan jumlah korban kekerasan berdasarkan kelompok usia.

Tabel 4.37
Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Kelompok Usia
Tahun 2024

Kategori	Jumlah Kasus
0-5	17
6-12	47
13-18	57
19-24	30
25-44	99
45-59	24
60+	1

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

Kelompok usia 25–44 tahun merupakan usia produktif, di mana perempuan umumnya berada dalam peran ganda, baik sebagai pekerja maupun sebagai istri dan ibu rumah tangga. Tingginya angka kekerasan pada kelompok ini mengindikasikan bahwa perempuan dewasa masih sangat rentan terhadap kekerasan, terutama dalam konteks rumah tangga dan relasi pasangan. Ini selaras dengan data sebelumnya yang menunjukkan bahwa kekerasan paling banyak terjadi di lingkungan rumah tangga dan dalam bentuk fisik atau seksual.

Sementara itu, tingginya angka kekerasan pada usia 13–18 tahun dan 6–12 tahun menandakan bahwa anak perempuan juga menghadapi risiko tinggi menjadi korban, baik dalam bentuk kekerasan seksual, psikis, maupun penelantaran, yang sering kali terjadi di lingkungan sekolah atau keluarga.

Jumlah korban usia 60+ sangat kecil (1 kasus), namun bukan berarti kelompok lansia, khususnya perempuan lansia, terbebas dari kekerasan—melainkan bisa jadi karena minimnya pelaporan atau kesadaran dalam melaporkan kasus kekerasan.

Berikut tersaji data mengenai jumlah korban berdasarkan pendidikan.

Tabel 4.42
Jumlah Korban Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2024

Kategori	Jumlah Kasus
NA	0
SD	63
SMP	60
SMA	101
Perguruan Tinggi	32
Tidak Sekolah	19

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

Tingginya jumlah korban pada kelompok pendidikan SMA menunjukkan bahwa remaja, khususnya perempuan, berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap kekerasan, baik di lingkungan sekolah, rumah tangga, maupun pergaulan sosial. Usia SMA umumnya berkisar antara 15–18 tahun, yang merupakan fase peralihan dari anak ke dewasa. Dalam banyak kasus, perempuan di kelompok usia dan jenjang ini sering menjadi sasaran kekerasan seksual, perundungan, tekanan psikis, hingga eksploitasi, yang kadang tidak mudah dilaporkan karena rasa takut atau tekanan sosial.

Kelompok SD dan SMP yang juga mencatat jumlah kasus cukup tinggi menunjukkan bahwa anak perempuan pada usia dini juga menghadapi risiko kekerasan, terutama di lingkungan rumah dan sekolah, yang seharusnya menjadi tempat yang aman. Sementara itu, pada jenjang perguruan tinggi, kekerasan masih terjadi, yang bisa mencerminkan kekerasan berbasis gender di lingkungan akademik maupun dalam relasi pacaran.

Korban dari kelompok tidak sekolah juga patut menjadi perhatian, karena mereka umumnya berasal dari latar belakang rentan secara sosial dan ekonomi, yang dapat memperburuk posisi perempuan dalam menghadapi kekerasan.

Data ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak serta-merta menjadi pelindung dari kekerasan, khususnya terhadap perempuan. Bahkan pada jenjang menengah seperti SMA, jumlah kasus cukup tinggi, mencerminkan perlunya pendidikan kesetaraan gender, perlindungan di lingkungan

pendidikan, serta sistem pelaporan yang aman dan ramah korban di setiap jenjang. Perempuan dari berbagai tingkat pendidikan tetap menghadapi risiko kekerasan, sehingga pendekatan pencegahan harus disesuaikan dengan konteks usia dan latar pendidikan masing-masing korban.

Tabel 4.39
Jumlah Korban Berdasarkan Pekerjaan
Tahun 2024

Kategori	Jumlah Kasus
NA	0
Bekerja	21
Pelajar	81
Ibu Rumah Tangga	51
Swasta	45
PNS/TNI/POLRI	2
Pedagang/Tani/Nelayan	14
Tidak Bekerja	54
Buruh	7

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

Ditinjau dari kekerasan yang terjadi berdasarkan pekerjaan terlihat bahwa kekerasan banyak dialami oleh pelajar sebesar 81 kasus; selanjutnya dialami oleh korban tidak bekerja sebanyak 54 kasus dan ibu rumah tangga dengan jumlah 51 kasus. Data ini menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan, terutama dalam posisi sosial yang minim kekuasaan dan perlindungan, seperti pelajar, ibu rumah tangga, dan perempuan yang tidak bekerja.

Pelajar menjadi kelompok dengan jumlah kasus tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa remaja perempuan, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sosial, masih rentan menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual dan psikis, yang sering kali sulit diungkap karena adanya tekanan atau rasa malu.

Ibu rumah tangga menempati posisi ketiga terbanyak. Ini menguatkan temuan sebelumnya bahwa rumah tangga masih menjadi lokasi paling rentan terhadap kekerasan, di mana perempuan sebagai istri dan ibu sering mengalami kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi dalam relasi domestik.

Korban yang tidak bekerja juga tinggi, yang umumnya merupakan perempuan dalam situasi ketergantungan ekonomi, membuat mereka lebih sulit untuk keluar dari siklus kekerasan.

Sementara kelompok PNS/TNI/POLRI dan buruh mencatat kasus relatif lebih rendah, namun bukan berarti kelompok ini terbebas dari kekerasan. Bisa jadi karena ada hambatan pelaporan, seperti ketakutan terhadap institusi, stigma, atau tekanan sosial di tempat kerja.

Data ini memperkuat bahwa posisi perempuan dalam struktur sosial—khususnya yang tidak memiliki penghasilan tetap atau berada dalam relasi kuasa yang timpang—membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan. Oleh karena itu, pendekatan penanganan kekerasan berbasis gender harus mempertimbangkan aspek pekerjaan dan status sosial perempuan, termasuk melalui pemberdayaan ekonomi, akses terhadap pendidikan, serta sistem perlindungan hukum dan layanan pendampingan yang ramah korban di berbagai lapisan masyarakat.

Tabel 4.40
Jumlah Korban Berdasarkan Status Perkawinan
Tahun 2024

Kategori	Jumlah Kasus
NA	0
Kawin	121
Ceraai	10
Belum Kawin	144

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

Berdasarkan jumlah korban dengan status perkawinan menunjukkan bahwa korban kekerasan terbanyak adalah korban yang belum menikah yaitu sebanyak 144 korban; 121 korban telah menikah dan 10 korban dengan status bercerai.

Angka kekerasan tertinggi pada kelompok belum kawin menunjukkan bahwa perempuan muda, termasuk remaja dan dewasa awal, sangat rentan mengalami kekerasan, terutama dalam bentuk kekerasan seksual, psikis, atau dalam relasi pacaran. Banyak dari korban ini kemungkinan adalah pelajar atau mahasiswa yang berada dalam relasi tidak setara dan belum memiliki perlindungan sosial atau ekonomi yang memadai.

Kelompok kawin dengan jumlah 121 kasus juga menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi isu serius. Dalam konteks ini, perempuan yang sudah menikah sering menjadi korban kekerasan oleh pasangan (KDRT), baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Tingginya angka ini mencerminkan masih kuatnya budaya patriarki, relasi kuasa yang timpang dalam pernikahan, serta minimnya perlindungan terhadap istri dalam ranah domestik.

Kelompok cerai mencatat kasus yang lebih sedikit (10 kasus), tetapi ini tidak berarti mereka lebih aman. Perempuan yang bercerai kerap menghadapi tantangan baru, seperti kekerasan dari mantan pasangan, stigma sosial, atau tekanan ekonomi, meski angka pelaporannya mungkin lebih rendah karena minim dukungan atau rasa takut untuk melapor.

Data ini menegaskan bahwa perempuan berada dalam posisi rentan terhadap kekerasan, baik sebelum menikah, saat menikah, maupun setelah perceraian. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender harus dilakukan secara menyeluruh di semua tahapan kehidupan perempuan, termasuk melalui edukasi kesetaraan gender sejak dini, perlindungan hukum dalam pernikahan, serta penguatan sistem dukungan bagi perempuan korban kekerasan.

BAB V

KESIMPULAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pendahuluan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Laporan ini menganalisis IPM berdasarkan jenis kelamin di Kota Semarang tahun 2024, dengan fokus pada tiga dimensi utama: kesehatan (AHH), pendidikan, dan standar hidup layak (pengeluaran riil). Analisis ini juga melibatkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) untuk memberikan gambaran tentang kesetaraan gender di kota tersebut.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Gender. Laki-laki: 87,03 dan perempuan: 83,87. terdapat selisih: 3,16 poin. IPM laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, menunjukkan adanya ketimpangan dalam capaian pembangunan antara gender, meskipun kedua nilai berada dalam kategori tinggi.
3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG), tahun 2023: 0,168,; dan tahun 2024: 0,140, terjadi penurunan 0,028 poin. Penurunan IKG mencerminkan perbaikan dalam kesetaraan gender, meskipun ketimpangan masih ada. Nilai IKG yang lebih rendah menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kesehatan, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi mulai berkurang.
4. Pengeluaran Riil per Kapita Berdasarkan Gender (2024). Laki-laki: Rp 18.175.000; dan perempuan: Rp 15.750.000, terdapat selisih: Rp 2.425.000. Laki-laki memiliki daya beli yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi kendala dalam mengakses sumber daya ekonomi secara setara.
5. Angka Harapan Hidup (AHH) Berdasarkan Gender (2024). Untuk Laki-laki: 76,37 tahun; dan perempuan: 80,22 tahun. Terdapat selisih: 3,85 tahun. Perempuan memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi, selaras dengan tren global. Ini menunjukkan bahwa dari sisi kesehatan,

perempuan memiliki keunggulan, meskipun hal ini belum cukup untuk mengimbangi ketimpangan di bidang ekonomi dan pendidikan.

Kesimpulan dan Rekomendasi Secara keseluruhan, Kota Semarang menunjukkan perkembangan positif dalam pembangunan manusia dan kesetaraan gender. Namun, ketimpangan masih nyata, terutama dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, rekomendasi berikut dapat dipertimbangkan:

- a) Peningkatan akses perempuan terhadap pekerjaan formal dan pelatihan keterampilan.
- b) Program afirmatif untuk perempuan dalam pendidikan tinggi dan kepemimpinan.
- c) Perlindungan sosial yang lebih kuat untuk perempuan pekerja informal.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan IPM antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan kualitas hidup secara merata di Kota Semarang.

Kesehatan

1. Cakupan pelayanan tinggi, tapi kematian ibu nifas dan bayi masih terjadi hal ini harus ada evaluasi kualitas dan efektivitas layanan.
2. Kematian bayi lebih dominan daripada balita membutuhkan intervensi prenatal dan neonatal yang lebih baik.
3. Stunting masih tinggi penting memperkuat gizi ibu hamil dan balita serta akses air bersih dan sanitasi. Serta mendorong perubahan perilaku dan kebijakan dalam penanganan stunting. Perlu integrasi antara layanan kesehatan ibu-anak dengan program pemberdayaan keluarga (misalnya PKK).

Kekerasan

Kekerasan terhadap anak merupakan isu gender yang serius. Tingginya jumlah korban anak perempuan menuntut respons berbasis gender, intervensi kebijakan yang menysasar akar kekerasan, serta peran aktif semua pihak dalam perlindungan anak.

Perempuan cenderung menjadi korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan eksploitasi. Laki-laki, meskipun jumlahnya lebih

kecil, juga tetap menjadi korban — namun bisa jadi tidak semua kasus dilaporkan karena stigma atau normalisasi kekerasan terhadap anak laki-laki.

Tingginya kasus kekerasan di rumah tangga menyoroti perlunya upaya berkelanjutan dalam pemberdayaan perempuan, penghapusan kekerasan berbasis gender, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan dan keamanan dalam lingkup domestik.

5.2. Saran

Pentingnya respons berbasis gender dalam penanganan kasus kekerasan:

1. Pelatihan aparat dan guru untuk deteksi dini berbasis gender.
2. Layanan pemulihan yang mempertimbangkan kebutuhan psikologis anak laki-laki dan perempuan secara berbeda.
3. Pendekatan komunitas untuk mencegah kekerasan, terutama di kecamatan dengan angka kasus tinggi.
4. Pendidikan kesetaraan gender sejak usia dini untuk mencegah kekerasan berbasis gender.
5. Pendampingan psikososial berbasis gender untuk korban, khususnya anak perempuan.
6. Pelatihan sensitif gender bagi aparat dan tenaga pendidik agar lebih peka terhadap indikasi kekerasan anak, baik laki-laki maupun perempuan.
7. Program pencegahan khusus untuk wilayah dengan kasus tinggi seperti Semarang Timur, Semarang Utara, dan Pedurungan.

DAFTAR PUSTAKA

Riant Nugroho – *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaan di Indonesia* (2008). Bahasan soal perspektif gender dalam sejarah dan gerakan perempuan Indonesia

Mansour Fakih – *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Sering dikutip dalam kajian lokal tentang dinamika gender di Indonesia

Sundari Sasongko – *Konsep dan Teori Gender* (BKKBN, 2009). Ringkasan teori-teori gender yang mudah diakses di konteks pendidikan dan sosial

Julia Cleves Mosse – *Gender & Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007 atau 2018 edisi terbaru). Membahas hubungan gender dan pembangunan sosial ekonomi

Alifiulahtin Utaminingsih – *Gender dan Wanita Karir* (2017). Mengaitkan teori gender dengan isu perempuan karier, konflik peran, dan dukungan sosial

Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010

Ferry Adhi Dharma. *Konstruksi Realitas Sosial*, Pemikiran Petter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial. Jurnal Ilmu Komunikasi. 7(1). 2018

Wewen Kusumi Rahayu, “*Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik*”, JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), 1(Juni, 2016), 99